

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN PENGELOLAAN
ASET TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah daerah kabupaten Dompu)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

A D N A N

NIM. 016418262

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang diajukan berjudul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen, Sistem Pengendalian Intern Dan Pengelolaan Aset Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Dompu, April 2014
Yang Menyatakan



(ADNAN)

NIR : 016418262

ABSTRAK

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN PENGELOLAAN ASSET TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU)

ADNAN

UPBJJ UT Mataram

Adnan.dpu@gmail.com

Kata kunci : sumber daya manusia (SDM), komitmen, system pengendalian intern, pengelolaan asset, dan pengelolaan keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari sumber daya manusia (SDM), komitmen, system pengendalian internal (SPI), serta pengelolaan asset terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Domp. Penelitian ini menggunakan 98 sampel dari 29 SKPD di Kabupaten Domp. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 20

Hasil penelitian menunjukkan pertama: secara simultan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semua variabel independent (sumber daya manusia, komitmen, system pengendalian intern, serta pengelolaan asset) secara bersama-sama terhadap pengeloan keuangan pemerintah Kabupaten Domp. Kedua secara parsial menyediakan bukti empiris pengaruh sumber daya manusia, system pengendalian intern, dan pengelolaan asset terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Domp, dan hanya variabel Komitmen saja yang tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Domupu

ABSTRACT

THE IMPACT OF HUMAN RESOURCES, COMMITMENT, INTERNAL CONTROL SYSTEM AND ASSET MANAGING TO FINANCIAL MANAGING OF LOCAL GOVERNMENT (STUDIES OF DOMPU REGENCY GOVERNMENT)

ADNAN

UPBJJ UT Mataram

Adnan.dpu@gmail.com

Key words : human resources, commitmen, internal control system, asset managing, and financial managing

This study is aimed to analyze the impact of human resources, commitment, internal control system and asset managing to financial managing of Dompu regency government. This study is using 98 sample from 29 SKPD in dompu regency government. The analysist used in this studi is multiple regreton by using SPSS 20.

The result showed : first, simultaneously this study provides evidence that that all independent variables (human resources, commitmen, internal control system and asset managing) jointly affect the financial managing of Dompu regency government. Second, this study partially provides evidence that human resources, internal control system and asset managing affected the financial managing of Dompu regency government, and only variable commitment that no affects to the financial managing of Dompu regency government.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDY ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : ADNAN
NIM : 016418262
Program Study : Administrasi Publik
Judul Thesis : Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen, Sistem Pengendalian Intern
Dan Pengelolaan Aset Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab. Dompu)

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program
Study Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 April 2014

Waktu : 17.30 – 19.30 Wita

Dan telah dinyatakan : LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Penguji Ahli : Prof. Dr. Azhar Kasim, M.P.A

Pembimbing I : Dr. Manggaukang Raba, MM

Pembimbing II : Dr. Endar Pituringsih, M.Si.AK

LEMBARAN PERSETUJUAN TAPM

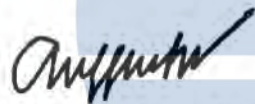
Judul TAPM : Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen, Sistem Pengendalian Intern Dan Pengelolaan Aset Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab. Dompu)

Penyusun TAPM : ADNAN
 NIM : 016418262
 Program Study : Administrasi Publik
 Hari/Tanggal : Maret 2014

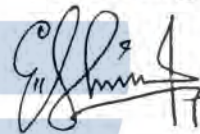
Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Manggaukang Raba, MM
 NIP.19611231 1986 03 1 172



Dr. Endar Pituringasih, M.Si.AK

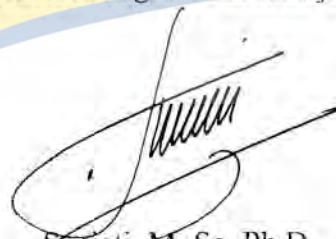
Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/
 Program Magister Administrasi
 Bidang Minta Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana



Florentina Ratih Wulandari, S.Ip, M. Si
 NIP. 19710609 199802 2 001



Suciati, M. Sc. Ph.D
 NIP. 19520213 198503 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur patut kiranya dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, akhirnya tesis berjudul ***“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Sistem Pengendalian Intern, dan Pengelolaan Aset terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Study pada Pemerintah Kabupaten Dompu)*** dapat diselesaikan. Dalam penyusunan tesis ini banyak kendala dan cobaan yang dihadapi oleh penulis, namun dengan kekuasaanya, Allah SWT tetap melimpahkan taufik dan inayahNya sehingga penulis tetap mampu menyelesaikan penulisan tesis ini, meskipun masih banyak kekurangannya.

Penulisan tesis ini, tentunya penulis banyak mendapatkan dukungan moril dan materiil dari berbagai kalangan, yang senantiasa memberikan masukan dan sarannya untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D, Selaku Direktur Porgram Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Florentina Ratih Wulandari, M.Ip, M.Si selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik.
4. Dr. Manggaukang Raba, MM selaku Pembimbing I yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr.Endar Pituringsih, M.Si.Ak selaku Pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
6. Drs. H. Bambang M. Yasin selaku Bupati Dompu yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis.

7. Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Kabupaten Dompu beserta seluruh stafnya yang telah memberikan dorongan, motivasi dan bantuannya selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan tesis ini.
8. Kepala UPBJJ-UT Mataram beserta stafnya atas bantuannya yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam proses belajar selama penulis mengikuti pendidikan
9. Ketua Pengurus POKJAR S2 UT Kabupaten Dompu atas bantuannya yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam proses belajar selama penulis mengikuti pendidikan.
10. Istriku yang tercinta Siti Asmah, S Ag dan anak-anakku yang tersayang (M. Thantowi Jauhari, M. As'ad Mubarak dan Maulana Yusuf Khairil) yang telah memberikan segalanya dalam menjalani kehidupan ini terutama sekali pada saatku menempuh pendidikan S2 ini.

Menyadari keterbatasan yang ada pada diri penulis, akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran terutama dalam penyempurnaan tulisan ini.

Dompu, April 2014

Penulis

ADNAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TAMP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. KAJIAN TEORI	16
1. Sumber Daya Manusia	16
2. Komitmen	18
3. Sistem Pengendalian Internal	21
a. Pengertian Pengendalian Internal	21
b. Tujuan Pengendalian Internal	22
c. Komponen Pengendalian Internal	23
4. Pengelolaan Aset	24
a. Pengertian Barang Milik Daerah	24
b. Pengelolaan Barang Milik Daerah	25
c. Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah	26
d. Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah	27
5. Laporan Keuangan Daerah	28
a. Kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan	28
b. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	30
c. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
d. Karakteristik Laporan Keuangan Daerah	33
e. Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	37
6. Penelitian Terdahulu	39
B. Kerangka Berpikir	43
C. Definisi Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	47
1. Jenis Penelitian	47
2. Lokasi Penelitian	47
B. Populasi Dan Sampel	47
C. Instrumen Penelitian	50

1. Skala Pengukuran	50
2. Instrumen	51
3. Pengujian Instrumen	54
a. Uji Validitas	54
b. Uji Reliabilitas	55
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	56
D. Prosedur Pengumpulan Data	62
1. Jenis Data	62
2. Sumber Data	62
a. Data Sekunder	62
b. Data Primer	62
3. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Metode Analisa Data	63
1. Pengujian Asumsi Klasik	63
a. Uji Normalitas	63
b. Uji Heterokedastistisitas	64
c. Uji Multikolinearitas	64
2. Analisis Regresi Berganda	65
3. Pengujian Hipotesis	66
a. Koefisien Determinasi	66
b. Uji Parsial (uji t)	66
c. Uji Simultan (uji f)	67
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	69
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
2. Deskripsi Lokasi	71
3. Gambaran Umum Responden	72
a. Penyebaran Dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	72
b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden	74
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	75
4. Analisis Statistik Deskriptif	76
a. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator Sumber Daya Manusia (SDM)	76
b. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator Komitmen	81
c. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator SPI	84
d. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator Pengelolaan Asset	89
e. Deskrip Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	101
5. Uji Asumsi Klasik	107
a. Uji Normalitas	107

b. Uji Multikolinearitas	108
c. Uji Heterokedastisitas	108
6. Hasil Analisis Regresi	109
a. Koefisien Determinasi (R^2)	109
b. Uji Parsial (uji t)	109
c. Uji Simultan (uji F)	110
B. Pembahasan	111
1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	112
2. Pengaruh Komitmen Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	114
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	115
4. Pengaruh Pengelolaan Asset Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Darerah	117
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. SIMPULAN	119
B. SARAN	120

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

I. Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	43
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Kuisisioner
2. Lampiran II Tabulasi Data
3. Lampiran III Analisis Deskriptif
4. Lampiran IV Uji Asumsi Klasik
5. Lampiran V Hasil Analisis Regresi



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Perkembangan Opini BPK teradap LKPD (Tahun 2006-2010)...	6
2. Tabel 1.2. Perkembangan Opini BPK teradap LKPD Wilayah NTB (Tahun 2006-2011).....	7
3. Tabel 3.1. Distribusi Sampel tiap SKPD	52
4. Tabel 3.2. Indikator Pengukuran SDM.....	54
5. Tabel 3.3. Indikator Pengukuran Komitmen.....	54
6. Tabel 3.4 Indikator Pengukuran SPI.....	55
7. Tabel 3.5. Indikator Pengukuran Pengelolaan Aset	55
8. Tabel 3.6. Indikator Pengukuran Pengelolaan Keuangan Daerah.....	56
9. Tabel 3.7. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Indikator SDM (X1)	59
10. Tabel 3.8. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Indikator Komitmen (X2)	60
11. Tabel 3.9. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Indikator SPI (X3)	61
12. Tabel 3.10. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Indikator Pengelolaan Aset (X14)	62
13. Tabel 3.11. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	63
14. Tabel 4.1. Distribusi Kuisisioner dan Tingkat Pengembaliannya.....	71
15. Tabel 4.2. Penyebaran dan Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	72
16. Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
17. Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	73
18. Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	74
19. Tabel 4.6. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Indikator SDM.	74

20. Tabel 4.7. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Indikator Komitmen	80
21. Tabel 4.8. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Indikator SPI	82
22. Tabel 4.9. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Indikator Pengelolaan Aset	88
23. Tabel 4.10. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	99
24. Tabel 4.11. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Z	105
25. Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinearitas	106
26. Tabel 4.13. Hasil uji Heteroskedastisitas	106
27. Tabel 4.14. Hasil uji Koefisien Determinasi	107
28. Tabel 4.15. Hasil Uji Parsial (Uji t)	107
29. Tabel 4.16. Hasil uji Simultan (Uji F)	108



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Kuisisioner
2. Lampiran II Tabulasi Data
3. Lampiran III Analisis Deskriptif
4. Lampiran IV Uji Asumsi Klasik
5. Lampiran V Hasil Analisis Regresi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah atau otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah termasuk memberikan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Kristiadi (1990) dalam Iksan (2011), secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pembagian kewenangan Pemerintahan dan keuangan, *Pertama* kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan terlebih dahulu, baru berdasarkan sumber-sumber keuangan yang telah dimilikinya kepada daerah diserahkan urusan-urusan tertentu untuk dilaksanakan.

Kedua, Urusan pemerintah antara pemerintah (pusat) dengan Pemerintah daerah dibagi terlebih dahulu baru kemudian kepada daerah-daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan urusan tersebut. Praktek yang diterapkan di Indonesia adalah pendekatan yang kedua, dimana kepala Daerah diberikan atau diserahkan terlebih dahulu urusan pemerintahan tertentu, baru kemudian diserahkan pula sumber-sumber keuangan untuk membiayai penyelenggaraan urusan yang telah diserahkan. Penyerahan sumber-sumber keuangan tersebut dapat dalam bentuk penyerahan sumber-sumber keuangan tersebut dapat dalam bentuk

penyerahan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, Retribusi daerah, laba perusahaan Daerah), maupun dalam bentuk alokasi dana kepada daerah, baik yang berupa bagi hasil penerimaan pajak pusat kepada daerah, bagi hasil pengelolaan sumber daya alam maupun dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Pemerintah daerah, sesuai amanat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Gubernur/Bupati/ Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan Masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan dan *timeliness* informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan PP

Nomor 24 Tahun 2005. Keandalan dan *timeliness* merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak (Rosalin dan Kawedar, 2011)

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Dompu tahun 2011 menyampaikan bahwa maksud Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 24 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri 59 Tahun 2007. Sedangkan tujuan dari penyusunan LPKD adalah: (1) Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah; (2) Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana; (3) Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah selama satu periode pelaporan; (4) Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; (5) Sebagai dasar dan acuan bagi stake hilder dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah dimasa yang akan datang; (6) Merupakan bahan atau alat analisis dalam penyusunan kebijakan pemerintah dalam penganggaran pembangunan daerah yang tepat sasaran serta berdaya

guna secara efektif dan efisien; (7) Bahan evaluasi dan kajian terkait dengan keberhasilan program dan kegiatan APBD tahun berjalan.

Laporan keuangan yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan harus disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memuat prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah di Indonesia. Dalam SAP disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni:

1. Relevan, berarti informasi dalam laporan keuangan harus memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
2. Andal, berarti informasi dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.
3. Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

4. Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan pemerintah seharusnya dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna sebagai mana dijelaskan dalam penjelasan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan aturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah diperoleh.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK menunjukan kualitas yang masih jauh dari harapan,

hal ini terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semeeter II tahun 2011 terhadap LKPD Tahun 2010, (IHPS BPK Semester II), BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD sebanyak 516, dimana BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 34 (7%), Wajar Dengan Penegecualian (WDP) sebanyak 341 (66%), Tidak Wajar sebanyak 26 (5%) dan Tidak Memberikan Pendapat sebanyak 115 (22%).

Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK terhadap LKPD (Tahun 2006-2010)

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	60%	58	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	300	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	70%	26	5%	115	22%	516

Sumber: IHPS BPK Semester II

BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 27 % tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah diantaranya efektifitas SPI Pemda yang bersangkutan belum optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan kegiatan pengendalian. Pada umumnya kelemahan tersebut meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi resiko dan analisis

resiko, lemahnya pengendalian fisik dan aset serta pencatatan yang kurang akurat dan tepat waktu.

Dalam wilayah Propinsi NTB BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 LKPD tahun 2011 termasuk LKPD Propinsi NTB, memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap 3 LKPD yakni Propinsi NTB, Kabupaten Dompu dan Kota Bima dan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap 8 LKPD yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

TABEL 1.2. Perkembangan Opini BPK terhadap LKPD wilayah NTB (2006-2011)

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Prop. NTB	WDP	TMP	WDP	WDP	TMP	TMP
2	Kab. Bima	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kab. Dompu	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
4	Kab. Lombok Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kab. Lombok Tengah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Lombok Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	Kab. Utara					WDP	WDP
8	Kab. Sumbawa	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Kab. Sumbawa Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kota Bima	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
11	Kota Mataram	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber: IHPS BPK Semester II

BPK RI Perwakilan Provinsi NTB memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*qualified opinion*) atas kedelapan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota/Kabupaten tersebut. Opini WDP adalah kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa LKPD disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecuali ada hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. BPK RI Perwakilan Provinsi NTB menyimpulkan bahwa masih ditemukan adanya kelemahan dan salah saji yang material atas kedelapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(<http://www.mataram.bpk.go.id/web/?p=2489>).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dompu tahun 2011 mendapatkan opini “tidak memberikan pendapat” dari BPK dan peridikat ini sudah disandang oleh pemerintah Kabupaten Dompu sejak enam tahun berturut-turut. Sejak tahun anggaran 2006 hingga tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Secara terus menerus memberikan catatan “Disclimer” atau tidak memberikan pendapat atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu. (<http://www.rimataram.com>).

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dompu, terus mendapatkan opini “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)”, hal ini ada bebarapa permasalahan pokok dalam pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Dompu antara lain sebagai berikut adalah

1. Sistem Pengendalian intern yang belum berjalan efektif.

ini tercemin dari hasil temuan BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Dompu antara lain:

- a. penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.5.320.000.000.00 tidak tepat peruntukannya.

- b. penyajian piutang retribusi pasar grosir/pertokoan senilai Rp.221.491.250,000 tidak didukung dengan bukti yang memadai.
- c. Penyajian saldo investasi permanent pada neraca sebesar Rp.4.486.893.397,28 tidak berdasarkan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh masing-masing SKPD atau oleh Bawasda terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila berjalan secara efektif tidak akan terjadi penyimpangan sebagaimana tersebut atas, sebab tujuan pengendalian intern adalah untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan berorientasi pada pencapaian visi dan misinya. Dengan pengawasan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk :

- 1). Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan,
- 2). Mencegah terulang kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan tersebut, dan
- 3). Mendapatkan cara-cara yang baik atau membina yang baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi (Iksan,dkk (2011).

2. Komitmen dalam mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yang belum optimal, ini tercermin dari temuan BKP terhadap laporan pengelolaan keuangan Kabupaten Dompu Tahun 2011 antara lain :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan Sebesar Rp. 1.000.000.000.00 tidak sesuai ketentuan

- b. Pendapatan retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Cacatan sipil tidak di stor ke kas Daerah sebesar Rp. 89.855.000,00.
- c. Realisasi belanja penunjang Operasional kepala Daerah atau wakil kepala daerah sebesar Rp. 68.000.000,00 digunakan oleh bendahara Sekretariat daerah tanpa bukti pertanggungjawaban.

Disamping lemahnya pengendalian intern yang dilakukan oleh pengawas internal, juga kurangnya komitmen pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk mentaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila komitmen pegawai tinggi tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan sebagaimana hasil temuan BPK tersebut diatas. Komitmen organisasional adalah loyalitas karyawan terhadap organisasi melalui penerimaan sasaran-sasaran, nilai-nilai organisasi, kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari organisasi, serta keinginan untuk bertahan di dalam organisasi (Harmoko dalam jurnal JAAI Vol.12 No.1)

3. Sumber daya manusia, sejak dilaksanakan otonomi daerah, Kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan yang sangat besar dalam hal penempatan, pemindahan, promosi serta penindakan terhadap pegawai daerah, sehingga kewenangan yang dimiliki ini membuat kepala daerah melakukan mutasi dan penempatan pegawai sesuai keinginannya tanpa mempertimbangan kompetensi, latar belakang pendidikan dan tidak melalui analisa jabatan, hal sesuai hasil reviu BPK terhadap kompetensi SDM yang ada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat analisa mengenai jenis pekerjaan dan perlu tidaknya pelatihan.
- b. Tidak terdapat ketentuan tingkat kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan.
- c. Tidak ada yang dapat menyakinkan bahwa seorang personil telah ditempatkan sesuai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan pada suatu pekerjaan.

Widodo (2001) dalam Sukmaningrum (2012) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

4. Pengelolaan aset yang belum optimal, ini tercermin dari temuan BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan Kabupaten Dompu Tahun 2011 antara lain :

- a. penatausahaan persediaan obat-obatan sebesar Rp. 1.637.887.049,5 tidak dilakukan secara memadai.
- b. Penyajian Aset tetap sebesar Rp. 735.458.777.461,000 belum sepenuhnya didukung data yang andal.

- c. belanja konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dianggarkan dan direalisasikan melalui belanja barang dan jasa serta tidak dikapitalisasi sebagai penambah aset tetap sebesar Rp. 944.117.000,00.
- d. Pekerjaan pemeliharaan lampu jalan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.
- e. Pengadaan bibit ternak kambing PE dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.
- f. Pengadaan barang sebesar Rp. 283.995.310,00 tidak sesuai dengan diperjanjikan dalam kontrak.
- g. Aset Daerah berupa Sepeda dan Komputer tidak diketahui keberadaannya.

Menurut Armansyah, (2012) pada Workshop penatausahaan aset menjelaskan bahwa gambaran kondisi aset kabupaten dompu adalah sebagai berikut: (1) Belum tercatat secara akurat; (2) Tercatat tetapi fisiknya tidak ada dan sebaliknya tidak tercatat tetapi fisiknya ada; (3) Tercatat dan ada fisiknya tetapi nilai perolehannya tidak ada; (4) Tercatat dan ada fisiknya tetapi nilai perolehannya berbeda dengan bukti pembelian; (5) Pengaman aset belum optimal; (6) Laporan aset belum berjalan sesuai ketentuan.

Pengelolaan aset atau pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar (Pangaribuan dan Sumini, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen, Sistem Pengendalian Intern, dan Pengelolaan aset terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (studi pada Pemerintah Kabupaten Dompu).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Sumber Daya Manusia mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu?
2. Apakah komitmen mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu?
3. Apakah sistem pengendalian intern mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu?
4. Apakah pengelolaan aset mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu?
5. Apakah sumber daya manusia, komitmen, system pengendalian intern dan pengelolaan aset bersama-sama mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu?
6. Faktor manakah yang paling dominan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

1. Mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu.
2. Mengetahui pengaruh komitmen terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu.
3. Mengetahui pengaruh pengelolaan aset terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu.
4. Mengetahui pengaruh sumber daya manusia, komitmen, pengendalian intern dan pengelolaan aset terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu.
5. Mengetahui sumber daya manusia, komitmen, system pengendalian intern dan pengelolaan aset secara bersama-sama mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu.
6. Mengetahui Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Dompu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan dapat digunakan dalam pengembangan teori, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan masukan bagi peneliti

berikutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2. Secara praktis hasil penelitian ini, dapat memberi manfaat bagi Aparat pemerintah Kabupaten Dompu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Hasil penelitian ini, salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Dompu dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sumber Daya Manusia

Istilah sumber daya manusia (*human resources*) menurut Simamora (2001:12) merujuk kepada orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi lebih jelas dikemukakan oleh Irawan (2000:3) bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah semua orang yang tergabung dalam suatu organisasi dengan peran dan sumbangannya masing-masing mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Dari sejumlah pengertian kapasitas dan sumber daya manusia, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kapasitas sumber daya manusia disini adalah kemampuan dari aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses pengelolaan anggaran daerah.

Tujuan organisasi agar dapat tercapai dengan baik membutuhkan sumber daya manusia yang dapat memenuhi syarat-syarat dan kriteria organisasi, diharapkan dengan adanya kriteria tersebut dapat membantu membentuk sumber daya menjadi sumber daya yang terampil dan berprestasi dengan maksimal. Menurut Hadori Nawawi seperti dikutip dari Ambar Teguh Sulistyani dan Rosidah (2003,) bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah meliputi :

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan organisasi (disebut juga personel, tenaga kerja, pegawai, dan karyawan)

- b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset berfungsi sebagai modal didalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan dalam potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensinya

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat didefinisikan bahwa sumber daya manusia adalah segala manusia yang ada dalam lingkungan organisasi yang berpotensi untuk menjadi penggerak segala kegiatan organisasi. Sumber daya manusia memiliki peran tidak terbatas dalam lingkup organisasi untuk mengembangkan dan menjadi pemacu utama dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi swasta maupun pemerintah semakin menyadari bahwa unsur manusia dengan kemampuan dan kapabilitas maksimal yang memiliki keunggulan kompetitif menjadi bagian tak terpisahkan dalam kesuksesan penyelenggaraan suatu organisasi.

Unsur-unsur sumber daya manusia sebagai mana yang diungkapkan Fausitino Cardoso Gomes dalam bukunya manajemen sumber daya manusia menyebutkan unsur-unsur tersebut adalah teridiri dari :

- a. Kemampuan (Capability)
- b. Sikap (Attitudes)
- c. Nilai-nilai (Value)
- d. Kebutuhan-kebutuhan (Needs)
- e. Karakteristik Demografisnya (penduduk)

Menurut Wiley (2002), dalam Warisno (2009), mendefinisikan Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Widodo (2001) dalam Sukmaningrum (2012) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

SDM adalah kesatuan tenaga manusia dalam suatu organisasi dan untuk mencapai tujuan organisasi, yang meliputi latar belakang pendidikan yang diperoleh responden, pemahaman tentang tugasnya, kesiapan dalam melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Azhar, 2007) dalam Budiarto, 2011)

2. Komitmen

Komitmen merupakan kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan kemampuan, perilaku, dan usaha dengan tujuan, kebutuhan prioritas organisasi. Komitmen sebagaimana dijelaskan oleh Khaerul Umam (2009) dapat dirumuskan dalam dua pendekatan definisi yakni *attitudinal commitment* atau pendekatan berdasarkan sikap, dan *behavioral commitment* atau pendekatan berdasarkan tingkah laku. *attitudinal commitment* berfokus pada proses ketika

seseorang mulai memikirkan hubungannya dalam organisasi atau menentukan sikapnya terhadap organisasi. Dengan kata lain hal ini dianggap sebagai suatu pola pikir individu di mana ia menempatkan dirinya yakni sejauh mana nilai dan tujuan organisasi sesuai dengan nilai dan tujuannya sendiri. Adapun *behavioral commitment* berhubungan dengan proses ketika individu merasa terikat dengan organisasi dan cara mereka mengatasi setiap masalah yang dihadapi (Khaerul umam 2009 : 257-258).

Meyer dan Allen (1991) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Berdasarkan definisi di atas maka anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan dapat bertahan sebagai bagian dari organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi.

Seseorang yang tidak memiliki komitmen, sebenarnya ia ahli dalam bidangnya (*competent*) namun ia bekerja dengan setengah hati. Karyawan yang memiliki suatu komitmen, akan bekerja secara total, mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan waktunya, ia mengerjakan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Menurut Hatmoko dalam Jurnal JAAI Vol. 12 No.1, Komitmen organisasional adalah loyalitas karyawan terhadap organisasi melalui penerimaan sasaran-sasaran, nilai-nilai organisasi, kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari organisasi, serta keinginan untuk bertahan didalam organisasi. Sedangkan dari Jurnal

Proceeding PESAT Vol.2, Spector mengatakan komitmen kerja melibatkan keterikatan individu terhadap pekerjaannya. Komitmen kerja merupakan sebuah variabel yang mencerminkan derajat hubungan yang dianggap dimiliki oleh individu terhadap pekerjaan tertentu dalam organisasi. Greenberg dan Baron mengemukakan bahwa komitmen kerja merefleksikan tingkat identifikasi dan keterlibatan individu dalam pekerjaannya dan ketidaksediaannya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut.

Menurut Meyer, Allen & Smith dalam jurnal Proceeding PESAT Vol.2, komitmen organisasi terdiri dari 3 komponen yaitu:

- a. Komitmen kerja afektif (*affective occupational commitment*)
Komitmen sebagai ketertarikan afektif/psikologis karyawan terhadap pekerjaannya. Komitmen ini menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka menginginkannya.
- b. Komitmen kerja kontinuans (*continuance occupational commitment*)
Mengarah pada perhitungan untung-rugi dalam diri karyawan sehubungan dengan keinginannya untuk tetap mempertahankan atau meninggalkan pekerjaannya. Artinya, komitmen kerja disini dianggap sebagai persepsi harga yang harus dibayar jika karyawan meninggalkan pekerjaannya. Komitmen ini menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka membutuhkannya.
- c. Komitmen kerja normatif (*normative occupational commitment*)
Komitmen sebagai kewajiban untuk bertahan dalam pekerjaannya. Komitmen ini menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan

karena mereka merasa wajib untuk melakukannya serta didasari pada adanya keyakinan tentang apa yang benar dan berkaitan dengan moral

Dari beberapa pengertian di atas jelas bahwa Komitmen merupakan bagian yang terkait dengan kemauan dan keinginan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam arti keinginan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan kemauan untuk mentaati segala peraturan-perundangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah walaupun dihadapkan situasi dan kondisi yang bagaimanapun.

3. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian pengendalian internal

Menurut Hartanto (1997) dalam Mardi (2011) menjelaskan, pengendalian internal dengan membedakan ke dalam arti yang sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengendalian internal disamakan dengan internal check yang merupakan mekanisme pemeriksaan keketelitian data administrasi. Sedangkan dalam arti luas, pengendalian internal disamakan dengan management control, yaitu suatu system yang meliputi semua cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Dan Sistem pengendalian intern menurut Petrovits *et al.* (2011) dalam Sukmaningrum (2012) menyatakan

Internal control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations.

Pengendalian internal merupakan suatu system yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. *Committee on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* mengemukakan, bahwa pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efesiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan (James Hall, 2009, dalam Mardi, 2011).

b. Tujuan pengendalian internal

Tujuan pengendalian internal, Sesuai dengan definisi yang dikemukakan AICPA, maka dapat dirumuskan tujuan dari pengendalian internal, yaitu: (1) Menjaga keamanan harga milik perusahaan; (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi, (3) Meningkatkan efisansi operasional perusahaan; (4) Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan

Tujuan pengawasan keuangan publik adalah untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan berorientasi pada pencapaian visi dan misinya. Dengan pengawasan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk : 1). Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan

ketidakadilan, 2). Mencegah teulang kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan tersebut, dan 3). Mendapatkan cara-cara yang baik atau membina yang baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi (Iksan,dkk (2011).

c. Komponen pengendalian internal

Adapun menurut Indriasari (2008) terdapat lima komponen didalam menjelaskan sitem pengendalian intern yaitu 1) *standar operating procedur*; 2) pemisahan wewenang; 3) dokumen dan catatan yang memadai; 4) tindakan disiplin atas pelanggaran; 5) pembatasan akses.

Menurut Mardi (2011), komponen pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh kejadian atau hubungan antar masing-masing komponen dalam sistem pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian, merupakan persepsi perorangan dalam perusahaan tentang pentingnya pengendalian internal, yang meliputi: a). Komitmen atas integritas dan nilai etika, b). Filosofi dan gaya beroperasi, c). Struktur organisasi, d). Badan audit dan dewan komisaris, e). Metode manajemen, f). Pengaruh internal.
2. Aktivitas Pengendalian, merupakan sekumpulan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dan digariskan untuk tujuan keberhasilan pengendalian dalam perusahaan, yang meliputi: a). Kewenangan penanganan transaksi, b). Spesialisasi tanggung

- jawab, c). Format dan penggunaan dokumen pekerjaan, d) Pengamanan harta kekayaan perusahaan, e). Independensi pemeriksaan.
3. Penilaian Resiko, merupakan instrumen penting dalam mengontrol bisnis perusahaan. Organisasi harus melakukan penilaian resiko untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengatur resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan.
 4. Kualitas Informasi dan Komunikasi, yang dihasilkan memberi dukungan penuh keberhasilan pimpinan membuat keputusan bisnis, informasi laporan yang dihasilkan SIA membantu pimpinan membuat keputusan terkait dengan operasi perusahaan serta bagaimana informasi keuangan yang dibuat dapat dikomunikasikan secara cepat dan akurat.
 5. Pengawasan, yang efektif dilakukan untuk meningkatkan kinerja bukan untuk menghilangkan kinerja dan prestasi kerja, dapat dilakukan antara lain: a). Supervisi yang efektif, b). Akuntansi pertanggungjawaban, c). Audit internal.

4. Pengelolaan Aset

a. Pengertian barang milik daerah

Asset (aset) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai: (1) nilai ekonomi (*economic value*), (2) nilai komersial (*commercial value*) atau (3) nilai tukar (*exchange value*), yang dimiliki

oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu / perorangan. Asset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Dengan demikian, barang milik daerah adalah: (1) semua barang inventaris yang dimiliki pemerintah daerah; (2) semua barang hasil kegiatan proyek APBD/APBN/LOAN yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi terkait; (3) semua barang yang secara hukum dikuasai oleh pemerintah daerah, seperti: cagar alam, cagar budaya, objek wisata, bahan tambang/galian C dan sebagainya, yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan yang memerlukan pengaturan pemerintah daerah dalam pemanfatannya serta pemeliharaannya (LAN, 2007).

b. Pengelolaan barang milik daerah

Pengelolaan barang atau sering disebut manajemen aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai asset, pemanfaatan asset, pencatatan nilai asset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan (LAN, 2007).

Tujuan manajemen asset adalah kedepan diarahkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Karena itu perlu mengembangkan atau mengoptimalkan

pemanfaatan asset daerah guna meningkatkan/mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat.

Pengelolaan aset atau pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar (Pangaribuan dan Sumini, 2010).

c. Asas pengelolaan barang milik daerah

pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan memperhatikan azas pengelolaan barang milik daerah, yaitu :

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan,

3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar,
 4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
 5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
 6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
- d. Siklus pengelolaan barang milik daerah

Pengelolaan barang milik daerah, tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaan sampai penghapusan barang, yang urutannya adalah: (1) perencanaan (planning), meliputi penentuan kebutuhan (requirement) dan penganggarannya (budgeting); (2) pengadaan (procurement), meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya; (3) penyimpanan dan penyaluran (storage and distribution); (4) pengendalian (controlling); (5) pemeliharaan (maintainance); (6) pengamanan (safety); (7) pemanfaatan penggunaan (utilities); (8) penghapusan (disposal); dan (9) inventarisasi (inventarization) (LAN, 2007).

Menurut Pangaribuan dan Sumini, (2010), Siklus pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang terdiri dari : 1). perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 2). Pengadaan, 3). penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 4). Penggunaan, 5). Penatausahaan, 6). Pemanfaatan, 7). pengamanan dan pemeliharaan, 8). Penilaian, 9). Penghapusan, 10). Pemindahtanganan, 11). pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 12). Pembiayaan, 13). tuntutan ganti rugi.

5. Laporan Keuangan Daerah

a. Kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan

Akuntabilitas menurut Krina, (2003) adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penetapan kebijakan. Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Bentuk akuntabilitas menurut Krina (2003: 11) sebagai berikut :

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.

Cara untuk mengetahui keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan adalah adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program dan kebijakan pembangunan di daerah

2. Akurasi dan kelengkapan informasi

Cara untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi yaitu informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup seluruh program/kebijakan daerah.

3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan

Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah di daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat dan telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan di daerah.

4. Kelayakan dan konsistensi.

Cara untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan telah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang disepakati.

5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

Cara untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan yaitu adanya hasil sebuah keputusan kebijakan daerah yang

disebarkan di media masa dan masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan.

Pemerintah daerah berkewajiban menyajikan laporan mengenai kinerja yang dilakukan, serta bagaimana pencapaian target-target yang terlaksana. Laporan tersebut harus memenuhi standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Standar akuntansi adalah pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi sebagai acuan pelaporan dapat menyebabkan kurangnya objektivifikasi dalam penyampaian, atau tidak adanya konsistensi dalam pelaporan serta dapat menyulitkan dalam pengauditan (Ritonga, 2011).

b. Jenis laporan keuangan pemerintah daerah

Adapun laporan keuangan pemerintah daerah meliputi

- 1) Laporan Neraca Anggaran, laporan ini menyajikan sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang mencerminkan perbandingan anggaran dan realisasinya.
- 2) Neraca adalah laporan yang menggambarkan keuangan daerah tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu.
- 3) Laporan Arus Kas, laporan ini melaporkan mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, serta pelaporan saldo pada tanggal pelaporan.
- 4) Catatan Atas Laporan Keuangan, laporan ini menjelaskan agenda secara naratif, analitis, dan terinci pada pelaporan realisasi anggaran (Anggarini dan Puranto, 2010: 345).

c. Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah

Tujuan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan serta untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Keberadaan laporan penting karena dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan selanjutnya. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas, realisasi anggaran dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah (Anggarini dan Puranto, 2010: 9)

Laporan keuangan organisasi sektor publik dibuat tentunya mempunyai tujuan dan fungsi, menurut Mardiasmo (2004), secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

- 1) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*). Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
- 2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and restrospective reporting*). Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika

ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

- 3) Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*). Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
- 4) Kelangsungan organisasi (*viability*). Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang atau jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
- 5) Hubungan masyarakat (*public relation*). Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- 6) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*). Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut Nunuy (2008), adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan: (1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dan pemerintah; (2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dan pemerintah; (3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; (4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; (5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; (6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; keuangan pemerintah harus menyajikan; (7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

d. Karakteristik laporan keuangan daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi (sukmaningrum, 2012). Menurut

Romney (2005) dalam Mardi (20011), ada enam karakteristik yang membuat suatu informasi berguna dan memiliki arti bagi pengambilan keputusan yaitu 1). Relevan, informasi harus memiliki makna yang tinggi sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi yang menggunakannya dan dapat digunakan secara tepat untuk membuat keputusan, 2). Andal, suatu informasi harus memiliki keterandalan yang tinggi, informasi yang dijadikan alat pengambilan keputusan merupakan kejadian nyata dalam aktivitas perusahaan, 3). Lengkap, informasi tersebut harus memiliki penjelasan yang rinci dan jelas dari aspek peristiwa yang diukurnya, 4). Tepat Waktu, setiap informasi harus dalam yang update tidak dalam bentuk yang usang, sehingga penting untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan, 5). Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam bentuk yang jelas akan memudahkan orang dalam menginterpretasikannya, 6). Dapat diverifikasi, informasi tersebut tidak memiliki arti yang ambigu, memiliki kesamaan pengertian bagi pemakainya.

Ada kriteria tertentu agar Laporan Keuangan Daerah berkualitas dan memenuhi ukuran yang ditetapkan. Kriteria tersebut penting karena Laporan Keuangan Daerah akan dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh berbagai pihak dalam mengambil kebijakan (Mahmudi, 2010: 8). Pelaporan yang tidak akuntabel dapat merugikan berbagai pihak. Apabila laporan yang disajikan itu kurang berkualitas, akan berdampak terhadap kesalahan dalam mengambil kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi buruk. Karakteristik laporan

keuangan Pemerintah Daerah adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga memenuhi tujuannya. Berikut karakteristik laporan keuangan (Forum Dosen Akuntansi, 2006) yaitu:

- 1) Relevan, artinya laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang memuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, aatau masa depan dan menegaskan atau mengoreski hasil evaluasi pengguna laporan masa lalu. Informasi yang relevan harus:
 - a) Memiliki manfaat upan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreski ekspektasinya di masa lalu.
 - b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dapat bagi pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan masa kini.
 - c) Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu, sehingga dapat berguna bagi pengguna laporan.
 - d) Lengkap, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus selengkap mungkin, yang memuat seluruh informasi

akuntansi, yang dapat berpengaruh pembuatan keputusan bagi pengguna laporan.

- 2) Andal, artinya informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi laporan yang andal adalah:
 - a) Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara jujur tanpa ada manipulasi, semua transaksi atau peristiwa keuangan lainnya
 - b) Dapat diverifikasi artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat diuji dan apabila dilakukan pengujian oleh pihak yang berbeda maka kesimpulan yang sama dan tidak ada informasi yang biasa.
 - c) Netral artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan umum bukan memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat dibandingkan, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.
- 4) Dapat dipahami, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memberikan informasi yang jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan.

e. Pemeriksaan keuangan pemerintah daerah

Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah memegang peran yang penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, serta target-target organisasi dengan tujuan untuk mendapat akuntabilitas dan proses belajar. Dianggap akuntabilitas apabila dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum. Sistem pemeriksaan akan memberikan informasi mengenai dampak dari program yang dilaksanakan, sehingga dapat diambil pelajaran bagaimana menciptakan program yang lebih efektif dan efisien (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006: 66).

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan pemerintahan daerah, yaitu: pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif (masyarakat dan DPRD); pengendalian merupakan mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin terlaksananya sistem dan kebijakan manajemen agar tujuan program pemerintah daerah dapat tercapai; dan pemeriksaan (audit) adalah kegiatan yang dilakukan lembaga independen, berkompeten, dan profesional untuk memeriksa kinerja pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum (Halim dan Damayanti, 2007: 48).

Laporan pemeriksaan akuntan ini merupakan bagian terakhir dari proses pemeriksaan. Laporan ini dibuat setelah pekerjaan pemeriksaan lapangan selesai. Dalam audit laporan keuangan, ada jenis-jenis

pendapat akuntan yang diberikan terhadap laporan keuangan klien, yang mencerminkan kualitas laporan keuangan tersebut. Jenis-jenis pendapat akuntan tersebut antara lain (Mahmudi, 2010: 38).

1) Wajar tanpa syarat (*unqualified opinion*)

Pendapat ini diberikan bila semua elemen laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan sesuai prinsip akuntansi yang sudah lazim dan diterapkan secara konsisten.

2) Wajar dengan syarat (*qualified opinion*)

Dalam pendapat ini, akuntan menyatakan laporan keuangan yang disajikan klien adalah wajar, tetapi ada beberapa elemen yang dikecualikan. Hal ini tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Pendapat ini dikeluarkan akuntan bila dalam pemeriksaannya ditemukan ketidakwajaran yang material di dalam elemen-elemen laporan keuangan.

4) Tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Hal ini terjadi jika :

- a) Pembatasan yang luar biasa terhadap luas pemeriksaan akuntan
- b) Adanya ketidakpastian yang luar biasa.
- c) Akuntan tidak bebas dalam hubungannya dengan klien.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Penelitian Indrisari dan Nahartoyo (2008) yang mengkaji Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir), menunjukkan bahwa: (1) Kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (2) Bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (3) Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (4) Bahwa kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Penelitian Roviyantje (2009), yang mengkaji pengaruh kompetensi SDM, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, menunjukkan: (1) Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di setiap Dinas; (2) Secara parsial Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

- c. Penelitian Warisno (2009), Pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM), Komunikasi, Sarana Pendukung, dan Komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD, menunjukkan: (1) Bahwa Kualitas SDM, Komunikasi, Sarana Pendukung, dan Komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD; (2) Secara parsial hanya kualitas SDM dan komunikasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD
- d. Penelitian Mustafa, et al. (2010) yang menganalisis factor-faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari, menunjukkan: (1) Bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan; (2) Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan; (3) Kapasitas SDM berpengaruh terhadap keterandalan bias disebabkan memang karakteristik SDM di Kota Kendari masih memiliki kapasitas yang rendah dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah khususnya dalam bidang akuntansi; (4) Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan.
- e. Penelitian Winidyaningrum (2010), yang mengkaji pengaruh SDM dan Pemanfaatan Teknologi informasi terhadap keterandalan dan

ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variable intervening pengendalian intern akuntansi, menunjukkan. (1) Bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (2) Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (3) Bahwa sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (4) Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

- f. Penelitian Arfianti (2011), menggunakan alat analisis partial Least Square dengan response 110 orang di bagian keuangan pada SKPD Kabupaten Batang, menunjukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- g. Penelitian Budiarto (2011), mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang menggunakan pendekatan formal, obyektif dan proses kerja yang sistimatis, dengan sampel penelitian terdiri dari 40 SKPD yang berada di Kabupaten Lombok Barat. Hasilnya menunjukan bahwa: (1) bahwa regulasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah; (2) Bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Standart Akuntansi Pemerintahan; (3)

Bahwa komitmen berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah; (4) Bahwa perangkat pendukung berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

- h. Penelitian Wardani (2012), mengkaji pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah propinsi NTB) dengan menggunakan analisis regresi logistik, hasil penelitian menunjukkan (1) Bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan; (2) Bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan; (3) Bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (4) Bahwa pengelolaan aset berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah:

2. Obyek penelitian,

Penelitian ini dilakukan di pemerintah Kabupaten Dompu dan belum pernah ada yang melakukan penelitian serupa di Kabupaten Dompu.

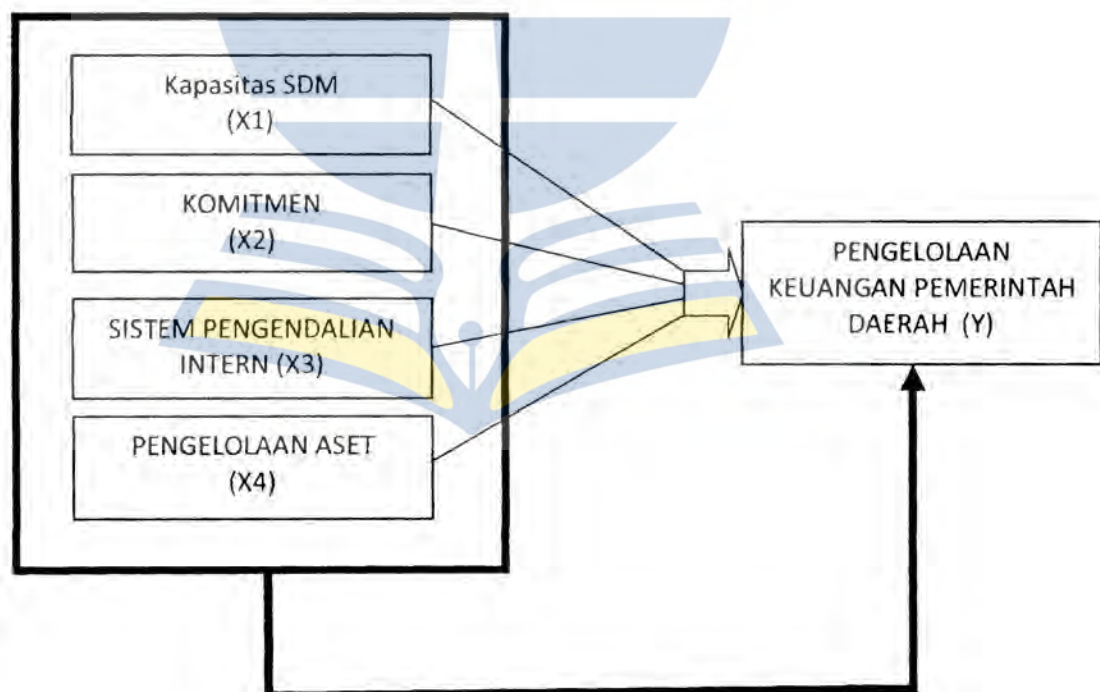
3. Variabel penelitian,

Variabel dalam penelitian ini, adalah Sumber daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen, dan Pengelolaan aset, yang

merupakan variabel bebas (independen) dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan variabel terikat (dependen).

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang diuraikan didepan, bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen yang akan diteliti adalah SDM, Komitmen, Pengendalian Intern dan Pengelolaan aset sedangkan variabel dependen adalah Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Hubungan variabel independen dan variabel dependen digambarkan dalam kerangka berpikir pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga terdapat hubungan yang positif antara SDM dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:
H1: Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah
2. Diduga terdapat hubungan yang positif antara Komitmen dengan kualitas laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :
H2: Komitmen berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
3. Diduga terdapat hubungan yang positif antara Sistem Pengendalian Intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :
H3: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah
4. Diduga terdapat hubungan yang positif antara pengelolaan aset dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :
H4: Pengelolaan aset berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah
5. Diduga secara simultan terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia, komitmen, system pengendalian intern, dan pengelolaan

aset dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan

H5 : Sumber daya manusia, komitmen, system pengendalian intern, dan Pengelolaan aset secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

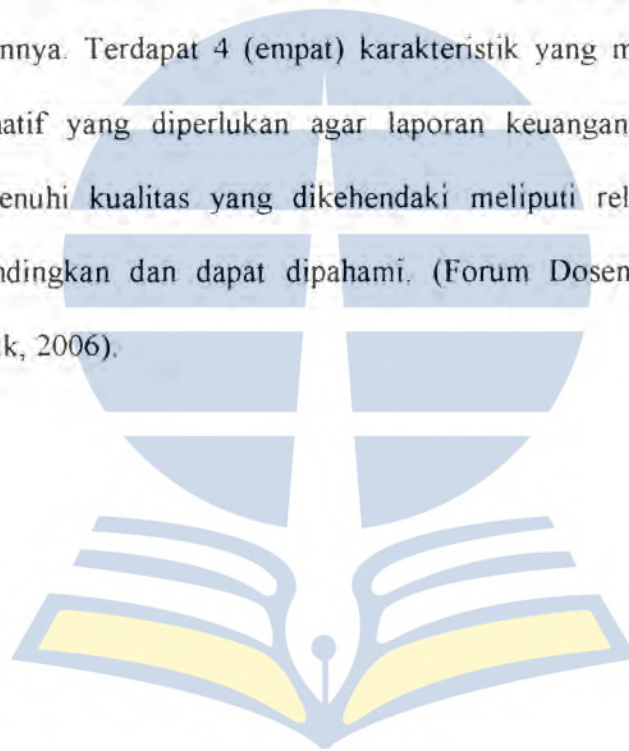
C. Definisi Operasional

Definisi Operasional Variabel independen dan variabel dependen masing –masing adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia, adalah kemampuan seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan yang diperoleh, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001)
2. Komitmen, adalah Loyalitas karyawan terhadap organisasi melalui penerimaan sasaran-sasaran, nilai-nilai organisasi, kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari organisasi, serta keinginan untuk bertahan didalam organisasi. (Hatmoko, dalam Jurnal JAAI Vol. 12 No, 1)
3. Sistem Pengendalian Internal, adalah merupakan suatu system yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. Dimana komponen Pengendalian Internal antara lain meliputi Kegiatan Pengendalian (Pemisahan fungsi, Dokumentasi atas transaksi, dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu), Lingkungan

Pengendalian (Pendelegasian Wewenangan dan Peran Pengawasan Internal) (Mardi, 2011)

4. Pengelolaan Aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (Pangaribuan dan Sumini, 2010)
5. Pengelolaan Keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat 4 (empat) karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asoatif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengatehui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan Kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) (Sugiono, 2011: 37)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 38 SKPD yang terdapat pada pemerintah Kabupaten Dompu. Diplihnya Pemerintah Kabupaten Dompu, karena laporan keuangan pemerintah kabupaten dompu yang dilakukan pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selalu mendapatkan opini yakni, “tidak memberikan pendapat (Disclamer Opinion)”. Waktu penelitian direncanakan selama 3 (tiga) bulan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah: (1) Pegawai yang terlibat dalam penatausahaan keuangan yang ada pada tiap-tiap SKPD yaitu pegawai yang ada pada Sekretaris SKPD atau tepatnya di Subbagian Keuangan dan; (2) Pegawai yang terlibat dalam penatausahaan barang milik daerah yang ada

pada tiap-tiap SKPD, yaitu pegawai yang ada pada Sekretaris SKPD untuk Instansi yang berbentuk dinas dan badan atau di Subbagian Tata Usaha untuk instansi yang berbentuk kantor.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan/peluang yang sama bagi setiap unsure atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan adalah *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. (Sugiono, 2011). Sampel yang dipilih berdasarkan kriteria:

1. Pejabat dan / atau aparatur yang terlibat langsung secara teknis dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan daerah dimasing-masing SKPD
2. Aparatur yang bertanggungjawab dalam penatausahaan barang milik daerah pada tiap-tiap SKPD.

Sesuai dengan kriteria tersebut maka pegawai yang akan dijadikan sebagai sampel sebanyak 4 (empat) responden pada masing-masing SKPD, yaitu:

1. Kasubbag Keuangan/PPK.
2. Kasubbag Umum.
3. Bendahara penerimaan/pengeluaran.
4. Pengurus Barang/Penyimpan Barang.

Penentuan jumlah sampel masing-masing SKPD ditetapkan 4 (empat) sampel, dengan pertimbangan peneliti sebagai berikut:

- a. Supaya unit analisis bersifat heterogen dan persepsi responden dapat menyebar secara merata di semua SKPD.
- b. Penentuan 4 (empat) sampel pada tiap SKPD karena hanya akan melihat persepsi Kasubbag Keuangan, Kasubag Umum, Bendahara penerima/pengeluaran dan pengurus barang/penyimpan barang.
- c. Penentuan 4 (empat) sampel pada tiap SKPD didasarkan pada asumsi bahwa Kasubbag Keuangan, Kasubag Umum, Bendahara penerima/pengeluaran dan pengurus barang/penyimpan barang yang mengetahui secara pasti mengenai pelaporan keuangan pada tiap SKPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu memiliki 29 (Dua Puluh Sembilan) unit SKPD dan sampel yang akan dijadikan responden sebanyak 4 (empat) sampel pada tiap-tiap SKPD, sehingga jumlah sampel sebanyak 116 responden, yang meliputi dinas, badan, kantor, sekretariat daerah, dan sekretariat dewan.

Tabel 3.1 Distribusi Sampel tiap SKPD

No	Unit Kerja	Populasi	Sampel
1	Sekretariat Daerah	12	4
2	Sekretariat DPRD	9	4
3	Inspektorat Daerah	7	4
4	Bappeda dan Litbang	8	4
5	Badan Kepegawaian Daerah	10	4
6	Badan Kesbanglinmas dan Poldagri	7	4
7	Badan PP dan KB	8	4
8	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan	8	4
9	Dinas PPKAD	11	4
10	Dinas Perkebunan	8	4

11	Dinas Kelautan dan Perikanan	9	4
12	Dinas Peternakan	10	4
13	Dinas Kesehatan	8	4
14	Dinas Dukcapil	9	4
15	Dinas Perhubungan dan Komunikasi informatika	8	4
16	Badan Pemberdayaan Masyarakat	8	4
17	Dinas Pekerjaan Umum	9	4
18	Dinas Sosnakertrans	9	4
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9	4
20	Dinas Koperindagtamben	7	4
21	Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga	10	4
22	Dinas Kehutanan	9	4
23	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	8	4
24	Kantor LHPM	6	4
25	Kantor Sat POL PP	6	4
26	Kantor Pelayanan Perzinan Terpadu	5	4
27	Kantor KPU	6	4
28	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	6	4
29	Kantor RSUD	6	4
	Total	202	116

Sumber: Data Primer diolah (tahun 2012)

C. Instrumen Penelitian

1. Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel independen adalah *model skala likert*. Menurut Sugiono (2011; 93), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dan alasan

lain dipilihnya skala likert karena relatif lebih mudah, menurut skala likert juga tercermin dalam keragaman skor (*variability of scor*) sebagai akibat penggunaan skala antara 1 sampai dengan 5. Variabel Independen (SDM, Komitmen, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengelolaan aset), diukur dengan menggunakan model skala likert lima point yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5
- b. Setuju (S) dengan nilai 4
- c. Netral (N) dengan nilai 3
- d. Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2
- e. Sangat Tidak Setuju (SS) dengan nilai 1

Variabel Dependen (pengelolaan keuangan pemerintah daerah), diukur dengan menggunakan model skala Guttman yaitu Skala untuk mengukur secara tegas dan konsisten tentang sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena tertentu yang ingin diketahui. Dalam pertanyaan hanya disediakan dua alternatif jawaban (dikotomi), yaitu hanya ya dan tidak, sehingga jika dikuantitatifkan nilainya 0 untuk jawaban tidak dan nilai 1 untuk jawaban ya.

2. Instrumen

Instrumen yang digunakan untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (X1), variabel ini menggunakan instrumen yaitu kuisioner adopsi dengan modifikasi dari penelitian Wardani, (2012). Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya

terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Tabel 3.2 Indikator pengukuran SDM

VARIABEL	INDIKATOR	ITEM PERTANYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA (X1)	PENDIDIKAN	3 Pertanyaan
	PELATIHAN	3 Pertanyaan
	KEMAMPUAN	3 Pertanyaan
	PENGALAMAN	2 Pertanyaan

- b. Komitmen (X2), variabel ini menggunakan instrumen yaitu kuisioner adopsi dengan modifikasi dari penelitian Budiarto (2011). Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Tabel 3.3 Indikator pengukuran Komitmen

VARIABEL	INDIKATOR	ITEM PERTANYAAN
Komitmen (X2)	Persepsi responden tentang keinginan untuk melaksanakan tugas	5 Pertanyaan

- c. Sistem Pengendalian Intern (X3), variabel ini menggunakan instrumen yaitu kuisioner adopsi dengan modifikasi dari penelitian Wardani, (2012). Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Tabel 3.4 Indikator pengukuran Sistem pengendalian intern

VARIABEL	INDIKATOR	ITEM PERTANYAAN
Sistem Pengendalian Intern (X3)	Pemisahan Fungsi (Kegiatan Pengendalian)	3 Pertanyaan
	Pendelegasian Wewenang (Lingkungan Pengendalian)	3 Pertanyaan
	Dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah (kegiatan pengendalian)	2 Pertanyaan
	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu (kegiatan pengendalian)	2 Pertanyaan
	Peran Pengawas internal pemerintah daerah (lingkungan pengendalian)	3 Pertanyaan

- d. Pengelolaan asset (X4), variabel ini menggunakan instrumen yaitu kuisioner adopsi dengan modifikasi dari penelitian Wardani (2012). Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Tabel 3.5 Indikator pengukuran pengelolaan asset

VARIABEL	INDIKATOR	ITEM PERTANYAAN
Pengelolaan asset (X4)	perencanaan kebutuhan dan penganggaran,	2 Pertanyaan
	Pengadaan	2 Pertanyaan
	Penggunaan	3 Pertanyaan
	Pemanfaatan	3 Pertanyaan
	Pengamanan dan pemeliharaan	2 Pertanyaan
	Penilaian	2 Pertanyaan
	Penghapusan	2 Pertanyaan
	Pemindahtanganan	2 Pertanyaan
	Penatausahaan	5 Pertanyaan
	pembinaan, pengawasan dan pengendalian	2 Pertanyaan

- e. Pengelolaan Keuangan Daerah, variabel ini menggunakan instrumen yaitu kuisioner adopsi dengan modifikasi dari penelitian Wardani,

(2012). Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Tabel 3.6 Indikator pengukuran laporan pengelolaan keuangan daerah

VARIABEL	INDIKATOR	ITEM PERTANYAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Y)	Relevan	7 Pertanyaan
	Andal	5 Pertanyaan
	Dapat dibandingkan	4 Pertanyaan
	Dapat dipahami	3 Pertanyaan

3. Pengujian Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh itu benar-benar valid dengan alat ukur yang valid. Menurut Sugiono (2011), instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dan menurut Ghazali (2009), sesuatu kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. uji validitas dilakukan menggunakan dengan menggunakan rumus *Corrected Item-Total Correlation* :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{((n \sum X^2 - (\sum X)^2) (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2))}}$$

Dimana:

- r = Koefisien korelasi
- n = Banyaknya sampel
- x = Skor masing-masing item
- y = Skor total variabel

Nilai *Corrected Item-Total Correlation* merupakan statistik hasil korelasi (r -hitung). Jadi, bila lebih r -hitung lebih besar daripada r -tabel (r -hitung r -Tabel), maka butir pertanyaan dinyatakan valid dan demikian sebaliknya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur data yang diperoleh benar-benar konsisten atau tidak ada kecenderungan berubah-ubah, apabila dilakukan pengukuran beberapa kali. Menurut Sugiono (2011), Instrumen yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Menurut Ghazali (2009) menyatakan suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reabilitas masing-masing instrumen, dilakukan dengan menggunakan koefisien cronbach alpha, dan suatu instrumen dikatakan reliabel jika memenuhi nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji *Alpha Cronbach*, Rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut:

$$\alpha = \left(\frac{K}{k - 1} \right) \left(\frac{S_{r^2} - \sum S_{i^2}}{S_{X^2}} \right)$$

Dimana :

α = Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach

K = Jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum s_i^2$ = Jumlah varians skor item

SX^2 = Varians skor-skor tes (seluruh item K)

4. Hasil Uji Validitas Dan Realibilitas Instrumen Penelitian

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item dalam kuesioner dapat mengukur secara tepat variabel-variabel yang diteliti. Validitas instrumen diuji dengan menggunakan tahnik *Korelasi Product Moment*. Instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasinya $\geq 0,3$ dengan alpha 5% (Sugiono, 1998).

Sementara itu, uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan dapat diterapkan berulang kali pada obyek yang sama. Pengukuran reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan metode *alpha cronbach* (α), dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel), apabila memiliki cronbach alpha $\geq 0,60$ (Sekaran, 2000 : 204). Uji validitas maupun uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 17.0 (*Statistical Program for Social Sciences*) for Windows.

- a. Uji validitas dan reliabilitas variabel pengelolaan keuangan pada indikator sumber daya manusia (SDM)

Hasil uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian pada variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator SDM (X_1) disajikan dalam Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator SDM (X_1)

Variabel/Item	Validitas dan Reliabilitas		Keterangan
	Koefisien	Alpha	
		0,794	Reliabel
$X_{1.1}$	0,664		Valid
$X_{1.2}$	0,422		Valid
$X_{1.3}$	0,657		Valid
$X_{1.4}$	0,545		Valid
$X_{1.5}$	0,665		Valid
$X_{1.6}$	0,627		Valid
$X_{1.7}$	0,448		Valid
$X_{1.8}$	0,515		Valid
$X_{1.9}$	0,580		Valid
$X_{1.10}$	0,545		Valid
$X_{1.11}$	0,707		Valid

Sumber : data primer (diolah : 2013)

Berdasarkan data dari tabel 3.7 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator SDM (X_1) mempunyai nilai koefisien korelasi $> 0,30$ dan tingkat alpha lebih besar dari 0,06. Dengan demikian semua item variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator SDM (X_1) dinyatakan valid dan Reliabel.

- b. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator komitmen (X_2)

Hasil uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian pada variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator komitmen (X_2) disajikan dalam Tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator Komitmen (X_2)

Variabel/Item	Validitas dan Reliabilitas		Keterangan
	Koefisien	Alpha	
		0,877	Reliabel
$X_{2.1}$	0,650		Valid
$X_{2.2}$	0,747		Valid
$X_{2.3}$	0,781		Valid
$X_{2.4}$	0,715		Valid
$X_{2.5}$	0,815		Valid

Sumber: Data Primer (Diolah) 2013

Berdasarkan data dari tabel 4.12. menunjukkan bahwa semua item pertanyaan variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator komitmen (X_2) mempunyai nilai koefisien korelasi $> 0,30$ dan tingkat alpha lebih besar dari 0,06. Dengan demikian semua item variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator komitmen (X_2) dinyatakan valid dan Reliabel.

c. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator spi (X_3)

Hasil uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian pada variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator SPI(X_3) disajikan dalam Tabel 3.9. di bawah ini.

Tabel 3.9. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator SPI (X₃)

Variabel/Item	Validitas dan Reliabilitas		Keterangan
	Koefisien	Alpha	
		0.902	Reliabel
X _{3.1}	0,453		Valid
X _{3.2}	0,537		Valid
X _{3.3}	0,585		Valid
X _{3.4}	0,738		Valid
X _{3.5}	0,621		Valid
X _{3.6}	0,558		Valid
X _{3.7}	0,595		Valid
X _{3.8}	0,620		Valid
X _{3.9}	0,757		Valid
X _{3.10}	0,743		Valid
X _{3.11}	0,727		Valid
X _{3.12}	0,685		Valid
X _{3.13}	0,624		Valid

Sumber: Data Primer (Diolah) 2013

Berdasarkan data dari tabel 3.9. menunjukkan bahwa semua item pertanyaan variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator SPI (X₃) mempunyai nilai koefisien korelasi $> 0,30$ dan tingkat alpha lebih besar dari 0,06. Dengan demikian semua item variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator SPI (X₃) dinyatakan valid dan Reliabel.

- d. Uji validitas dan reliabilitas variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator pengelolaan asset (X₄)

Hasil uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian pada variabel Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator pengelolaan Asset (X_4) disajikan dalam Tabel 3.10. di bawah ini.

Tabel 3.10. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator pengelolaan Asset (X_4)

Variabel/Item	Validitas dan Reliabilitas		Keterangan
	Koefisien	Alpha	
		0,917	Reliabel
$X_{4,1}$	0,562		Valid
$X_{4,2}$	0,501		Valid
$X_{4,3}$	0,544		Valid
$X_{4,4}$	0,645		Valid
$X_{4,5}$	0,682		Valid
$X_{4,6}$	0,538		Valid
$X_{4,7}$	0,714		Valid
$X_{4,8}$	0,624		Valid
$X_{4,9}$	0,560		Valid
$X_{4,10}$	0,612		Valid
$X_{4,11}$	0,541		Valid
$X_{4,10}$	0,661		Valid
$X_{4,12}$	0,651		Valid
$X_{4,13}$	0,656		Valid
$X_{4,14}$	0,595		Valid
$X_{4,15}$	0,532		Valid
$X_{4,16}$	0,495		Valid
$X_{4,17}$	0,482		Valid
$X_{4,18}$	0,395		Valid
$X_{4,19}$	0,367		Valid
$X_{4,20}$	0,470		Valid
$X_{4,21}$	0,407		Valid
$X_{4,22}$	0,338		Valid
$X_{4,23}$	0,578		Valid
$X_{4,24}$	0,664		Valid
$X_{4,25}$			Valid

Sumber: Data Primer (Diolah) 2012

Berdasarkan data dari tabel 3.10, menunjukkan bahwa semua item pertanyaan Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator pengelolaan Asset (X_4) mempunyai nilai koefisien korelasi $> 0,30$ dan tingkat alpha lebih besar dari 0,06. Dengan demikian semua item variabel Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Indikator pengelolaan Asset (X_4) dinyatakan valid dan Reliabel.

- e. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah (y)

Tabel 3.11. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Variabel/Item	Validitas dan Reliabilitas		Keterangan
	Koefisien	Alpha	
		0,796	Reliabel
Y_1	0,339		Valid
Y_2	0,524		Valid
Y_3	0,393		Valid
Y_4	0,331		Valid
Y_5	0,337		Valid
Y_6	0,486		Valid
Y_7	0,519		Valid
Y_8	0,399		Valid
Y_9	0,401		Valid
Y_{10}	0,541		Valid
Y_{11}	0,534		Valid
Y_{12}	0,602		Valid
Y_{13}	0,311		Valid
Y_{14}	0,538		Valid
Y_{15}	0,492		Valid
Y_{16}	0,330		Valid
Y_{17}	0,389		Valid
Y_{18}	0,519		Valid
Y_{19}	0,440		Valid

Sumber: Data Primer (Diolah) 2013

Berdasarkan data dari tabel 3.11. menunjukkan bahwa semua item pertanyaan variabel pengelolaan keuangan daerah (Y) mempunyai nilai koefisien korelasi $> 0,30$ dan tingkat alpha lebih besar dari 0,05. Dengan demikian semua item variabel pengelolaan keuangan daerah (Y) dinyatakan valid dan mempunyai tingkat reliabilitas lebih besar dari 0,60 ($0,818 > 0,60$).

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil analisa kuesioner yang diberikan pada responden yang ada pada tiap-tiap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiono, 2011). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari dokumentasi tiap-tiap SKPD, buku referensi dan informasi lain yang ada kaitan dengan penelitian ini.

b. Data Primer

Data primer merupakan sumber yang langsung memberikan data pada pengumpul data Sugiono (2011). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisisioner pada responden tiap-tiap SKPD.

3 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data, (Sugiono, 2011). Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Penyebaran Kuisisioner

Kuisisioner yang berupa pertanyaan dan pernyataan disebarakan pada responden pada tiap-tiap SKPD.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk menelaah jurnal-jurnal, laporan-laporan, dan refensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisa Data

Pada penelitian ini analisa data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pengujian Normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedasitas. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

a. Uji normalitas

Uji normalitas adalah pengujian dalam model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah

distribusi data normal atau mendekati normal. (Santoso, 2002 dalam Sani, 2010)

Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. jika nilai signifikan dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov e° 0,05, maka distribusi normal dan sebaliknya.

b. Uji heterokedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. *heteroskedastisita* diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. bila signifikan hasil kolerasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung *heteroskedastisitas* dan sebaliknya. (Ahmad Sani, 2010).

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel indenpendent). jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel bebas. untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (variance inflaction factor). (Santoso, 2002 dalam Sani, 2010).

2. Analisis Regresi Berganda

Teknik analisa data dengan menggunakan: (1) Statistik deskriptif, yaitu statistik yang dipergunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011); (2) Statistik inferensial, yaitu analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun secara parsial. Sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Analisis Regresi Linier Berganda*, dengan menggunakan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = laporan pengelolaan keuangan (dimana nilai 1 adalah berkaulitas, sedangkan nilai 0 adalah tidak berkaulitas).

X1 = Sumber Daya Manusia

X2 = Komitmen

X3 = Sistem Pengendalian Intern,

X4 = Pengelolaan aset

a = Konstansta

b1,b2,b3,b4 = koefisien X1, X2, X3, dan X4

e = Error

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun metode statistik yang digunakan adalah sebagai berikut

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. Menurut Algifari, (1997) menyatakan bahwa R^2 mampu memberikan informasi mengenai variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan. Agus Widarjono, (2010) koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = 1 - \frac{(\sum e^2) / (n-k)}{\sum (Y_i^2 - \bar{Y})^2 / (n-1)}$$

Dimana :

k = jumlah parameter estimasi

n = jumlah observasi

Apabila koefisien determinasi (R^2) mendekati angka satu (1) berarti terdapat hubungan yang kuat.

b. Uji parsial (uji t)

Untuk menguji hipotesis pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat yang ditetapkan dalam penelitian ini

digunakan uji t dengan $\alpha = 5\%$, dimana kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1) Hipotesis:

$H_0: \beta_1=0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X_1, X_2, X_3 , dan X_4 secara parsial terhadap variabel Y .

2) Dasar Pengambilan Keputusan:

Jika $p < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak

c. Uji secara simultan (Uji F)

Untuk menguji hipotesis pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat yang ditetapkan dalam penelitian ini digunakan uji F dengan $\alpha = 5\%$, dimana kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1) Hipotesis:

$H_0: \beta_1=\beta_2=0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 , secara simultan terhadap variabel Y .

2) Dasar Pengambilan Keputusan:

Jika $p < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Uji F ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 / (k-1)}{1 - R^2 / n - k}$$

Dimana

F hitung = Nilai F Hitung

n = Jumlah observasi

k = Jumlah parameter

R^2 = Koefisien Determinasi

Jk (residu) = Jumlah kuadrat residu

Dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dapat diketahui hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, apabila F hitung $\leq$ F tabel maka H_0 diterima dan apabila F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Pulau Sumbawa bagian tengah, dengan luas wilayah 2.324,55 Km² dan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Lautan Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

Secara administratif Kabupaten Dompu terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 79 Desa dengan 8 Desa Persiapan, 9 Kelurahan, 41 Lingkungan dan 348 Dusun, dengan luas wilayah yaitu seluas 2.324,55 km². Wilayah Kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Pekat dengan luas 875,17 km², sedangkan wilayah Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Pajo yaitu seluas 135,32 km².

Luas perairan laut di Kabupaten Dompu seluas 1.298,17 Km² dan panjang pantai 272,6 Km yang terdiri dari 3 (tiga) teluk, antara lain : Teluk Cempi, Teluk Saleh, dan Teluk Sanggar. Dengan kondisi luas yang demikian, maka memberikan peluang bagi Kabupaten Dompu untuk konsisten

memanfaatkan potensi kelautan sebagai penggerak utama roda perekonomian daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

a. Visi Kabupaten Dompu

Visi Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dompu tahun 2005 – 2025, kondisi daerah pada saat ini, dan analisis terhadap peluang dan tantangan pembangunan lima tahun kedepan, Visi pembangunan Kabupaten Dompu yang ingin diraih dalam lima tahun mendatang adalah “ **terwujudnya masyarakat dompu yang mandiri dan religius** ”

Ada tiga kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Dompu 2011 – 2015, tersebut, yaitu:

1. Kata “**Masyarakat Dompu**” mengandung makna seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu.
2. Kata “**Mandiri**” mengandung makna bahwa masyarakat Dompu mampu melayani kebutuhan hajat hidup diri dan keluarganya dengan bekerja keras melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki, keterampilan dan ilmu pengetahuan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan falsafah Agama Islam bahwa “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”
3. Kata “**Religius**” mengandung makna bahwa masyarakat Dompu memiliki keyakinan dan pengamalan terhadap ajaran agama, sehingga tercipta masyarakat yang taqwa, rukun, damai dalam menyelenggarakan kehidupan yang bersifat dunia dan akhirat.

b. Misi Kabupaten Dompu

Dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan di atas, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Dompu Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

1. Menumbuhkan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku usaha
2. Mengembangkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, berbudaya, dan saling menghormati sesama
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas.
4. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penataan kota yang indah, nyaman, dan mempesona serta lingkungan yang lestari.
5. Menegakkan supremasi hukum, menjalankan pemerintahan yang amanah, istiqomah, dan bebas dari KKN, serta memantapkan pelayanan publik.

2. Deskripsi Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Dompu Propinsi NTB yang terdiri dari 29 Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu 15 Dinas, 6 Badan, 2 Sekretariat, dan 6 Kantor. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan

daftar pertanyaan (kuesioner) yang disebar pada tiap-tiap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. Populasi dalam penelitian ini adalah: (1) Pegawai yang terlibat dalam penatausahaan keuangan yang ada pada tiap-tiap SKPD yaitu pegawai yang ada pada Sekretaris SKPD atau tepatnya di Subbagian Keuangan dan; (2) Pegawai yang terlibat dalam penatausahaan barang milik daerah yang ada pada tiap-tiap SKPD, yaitu pegawai yang ada pada Sekretaris SKPD atau tepatnya di Subbagian Umum.

Penelitian ini mengambil 4 (empat) responden pada masing-masing SKPD, yaitu: 1). Kasubbag Keuangan, 2). Kasubbag Umum, 3). Bendahara Pengeluaran, 4). Pengurus Barang/Penyimpan Barang. Penyebaran kuisisioner dilakukan sejak tanggal 25 april sedangkan batas pengumpulan akhir kuisisioner adalah tanggal 15 juni 2013. Distribusi kuisisioner untuk SKPD di Pemerintah Kabupaten Dompu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Distribusi Kuisisioner dan Tingkat Pengembaliannya

No	Uraian	Jumlah	Kuisisioner yang dikirim	Kuisisioner yang Kembali	Kuisisioner yang tidak Kembali
1	Dinas	15	60	51	9
2	Badan	6	24	19	5
3	Sekretariat	2	8	7	1
4	Kantor	6	24	21	3
	Total	29	116	98	18

Sumber : Data Primer (diolah, 2013)

3. Gambaran Umum Responden

a. Penyebaran Dan tingkat Pengembalian Kuesioner

Responden dalam penelitian ini sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya terdiri dari 29 SKPD yang ada di kabupaten Dompu dengan total populasi 202 responden. Dari jumlah

tersebut diambil 4 responden dari masing- masing SKPD sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 116. Jumlah kuesioner yang dikirim ke responden disesuaikan dengan jumlah sampel yang diuraikan sebelumnya pada bagian metodologi penelitian yakni 116. Dari jumlah tersebut ternyata yang kembali adalah 89 responden, sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 18 buah kuesioner. Dengan demikian maka tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) dalam penelitian ini adalah sebesar 84,48% ($98/116 \times 100\%$). Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah sebanyak 98 kuesioner. Untuk lebih jelasnya perhitungan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2. Penyebaran dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Σ Kuesioner
1	Kuesioner yang dikirim ke responden	116
2	Kuesioner yang tidak dikembalikan	18
3	Kuesioner yang kembali	98
4	Kuesioner yang diolah	98
	<i>Response Rate</i> ($98/116 \times 100\%$)	84,48%

Sumber: Data Primer (diolah, 2013)

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil pengisian kuisisioner dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 98 responden, yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.1	Laki-laki	33	70.21
2.2	Perempuan	14	29.79
	Jumlah	47	100,00

Sumber: Data Primer (diolah, 2013)

Berdasarkan tabel 4.3. menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berjenis kelamin laki-laki (70.21%), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 14 responden atau sebesar 29.79%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	TK PENDDK	JUMLAH	(%)
1	SMA	38	38,78%
2	D1	0	00,00%
3	D3	5	5,10%
4	S1	54	55,10%
5	S2	1	01,02%
	Total	98	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2013

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan strata 1 (S1) yakni sebanyak 54 responden atau 55,10%, SMA sebanyak 38 responden atau 38,78%, D3 sebanyak 5 responden atau 5,10%, dan sisanya S2 sebanyak 1 responden. Sedangkan responden dengan latar belakang pendidikan D1 sebanyak 0 atau 0,00% yang berarti bahwa dari total 98 responden tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan D1. Jika melihat data di atas dengan

responden terbesar adalah berlatar belakang pendidikan strata satu (S1) maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dompu, dengan asumsi bahwa semakin banyak sumber daya dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi maka akan semakin meningkatkan kemampuan sumber daya tersebut dalam menyelesaikan fungsi dan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat ditunjukkan pada tabel 4.5. berikut ini.

Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No.	LAMA BEKERJA	JUMLAH	(%)
1	1-2 THN	1	01,02%
2	3-5 THN	16	16,33%
3	5-10 THN	26	26,53%
4	10-15 THN	16	16,33%
5	15-20 THN	21	21,43%
6	20 KEATAS	18	18,37%
	Total	98	100%

Sumber: Data Primer (diolah, 2013)

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa jika di ukur dari lama berkerja diketahui dari 98 reponden hanya 1% saja dari responden yang bekerja di bawah 3 tahun, sementara itu sebagian besar telah bekerja di atas lima tahun, hal ini seharusnya dapat meningkatkan kinerja dari para pegawai yang diharapkan dengan semakin lama periode berkerja berjalan searah dengan peningkatan kemampuan pegawai serta komitmen yang dimilikinya.

4. Analisis Statistik Deskriptif

- a. Deskripsi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator sumber daya manusia (SDM)

Tabel 4.6. pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator sumber daya manusia (SDM)

No	Item Pertanyaan	Skor Jawaban Responden										Rata- rata
		1		2		3		4		5		
		F	%	F	%	F	%	f	%	f	%	
1	Item1 (X1,1)	1	1	20	20.4	15	15.3	40	40.8	22	22.4	3.63
2	Item2 (X1,2)	-	-	2	2.0	6	6.1	55	56.1	35	35.7	4.25
3	Item3 (X1,3)	-	-	6	6.1	20	20.4	51	52.0	21	21.4	3.88
4	Item4 (X1,4)	1	1	-	-	2	2.0	48	49.0	47	48.0	4.42
5	Item5 (X1,5)	1	1	-	-	1	1	42	42.9	54	55.1	4.51
6	Item6 (X1,6)	1	1	1	1	8	8.2	59	60.2	29	29.6	4.16
7	Item7 (X1,7)	-	-	6	6.1	13	13.3	60	61.2	19	19.4	3.93
8	Item8 (X1,8)	-	-	4	4.1	20	20.4	54	55.1	20	20.4	3.91
9	Item9 (X1,9)	-	-	5	5.1	9	9.2	62	63.3	22	22.4	4.03
10	Item10 (X1,10)	-	-	11	11.2	7	7.1	53	54.1	27	27.6	3.98
11	Item11 (X1,11)	-	-	2	2.0	5	5.1	60	61.2	31	31.6	4.22
	Total	4		57		106		584		327		1.072
	Persentase	0,3		5,3		9,8		54,2		30,3		100

Sumber : data primer (diolah :2013)

Berdasarkan tabel 4.6, dari jawaban responden terhadap item dari SDM (X1)) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item Sub bagian keuangan/akuntansi dan umum memiliki staf yang berkualitas (minimal berpendidikan S1) dan jumlah yang cukup (X1,1), dari 89 responden terdapat 40 orang responden (40,8%) yakni terbanyak menjawab setuju, 22 orang atau 22,4 persennya menyatakan sangat setuju,

dan 15 orang menyatakan netral, serta 20 orang tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata didapat nilai 3,36, hal ini menunjukkan responden menyatakan netral.

2. Pada item sub bagian keuangan/ akuntansi harus memiliki pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, dari 89 responden terdapat 55 orang responden (56,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 35 orang atau 35,7% menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,25, hal tersebut berarti responden setuju, bahwa staf pada bagian keuangan harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi untuk dapat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan kualitas baik.
3. Pada item sub penempatan pegawai di subbagian keuangan saat ini kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya ($X1,3$) dari 89 responden terdapat 51 orang responden (52,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 21 orang atau 21,4 persennya menyatakan sangat setuju. Sedangkan 20 responden netral dan sisanya 6 orang responden tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,88, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.
4. Pada item sub Selain pendidikan formal, saya membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas ($X1,4$), dari 89 responden terdapat 48 orang responden (49,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 47 orang atau 48,0 persennya menyatakan sangat setuju. Sedangkan sisanya 2 % responden netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,42, hal tersebut

berarti responden setuju, bahwa selain pendidikan formal juga dibutuhkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

5. Pada item sub Saya membutuhkan sosialisasi dan pelatihan setiap terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan (bagi subbag keuangan) dan pengelolaan asset (bagi subbag umum) untuk menambah pengetahuan yang dapat mendukung pekerjaan saya di bagian keuangan/akuntansi dan umum, dari 89 responden sebanyak 54 orang responden (55,1%) yakni terbanyak menjawab sangat setuju, 42 orang atau 42,9 persennya menyatakan setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,51, hal tersebut berarti responden setuju, bahwa mendapatkan sosialisasi dan pelatihan setiap ada perubahan peraturan dapat mengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
6. Pada item sub dengan pelatihan di bidang keuangan daerah (bagi subbag keuangan) dan pengelolaan aset (bagi subbag umum), saya memiliki keahlian khusus yang mendukung pekerjaan saya di bagian keuangan / akuntansi dan umum dari 89 responden terdapat 59 orang responden (60,2%) yakni terbanyak menjawab setuju, 29 orang atau 29,6% menyatakan sangat setuju dan 8,2% netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,16, hal tersebut berarti responden setuju, bahwa pelatihan yang diperoleh mengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
7. Pada item sub Saya memahami system dan prosedur penatusahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan penatususahaan

barang memiliki daerah (bagi subbag umum) untuk mendukung penyusunan laporan keuangan, dari 89 responden terdapat 60 orang responden (61,2%) yakni terbanyak menjawab setuju, 19 orang atau 19,4% menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,93, hal tersebut berarti sebagian besar responden netral.

8. Pada item sub Secara umum saya mampu memahami unsur-unsur dalam laporan neraca, realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan (bagi subbag keuangan) dan laporan atas serta mekanisme penyusunannya untuk mendukung penyusunan laporan, dari 89 responden terdapat 54 orang responden (55,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 20 orang atau 20,4 persennya menyatakan sangat setuju, dan 20,4 % lainnya netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,91, hal tersebut berarti sebagian besar responden netral.
9. Pada item sub Saya memahami mekanisme penyusunan laporan neraca, realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan (bagi subbag umum) dan laporan atas pengelolaan barang milik daerah (bagi subbag umum) untuk mendukung penyusunan laporan keuangan, dari 89 responden terdapat 62 orang responden (63,3%) yakni terbanyak menjawab setuju, 22 orang atau 22,4 persennya menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,09, hal tersebut berarti sebagian besar responden setuju, bahwa pemahaman mekanisme pelaporan dapatengaruhi kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
10. Pada item sub pegawai dengan masa kerja diatas 5 tahun mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan pegawai dengan

kerja di bawah 5 tahun dari 89 responden terdapat 53 orang responden (59,3%) yakni terbanyak menjawab setuju, 27 orang atau 30,3 persennya menyatakan sangat setuju, dan 11 responden tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,98, hal tersebut berarti sebagian besar responden netral.

11. Pada item sub Seiring bertambahnya masa kerja saya pengalaman saya dalam penatausahaan keuangan (bagi subbag keuangan) dan penatausahaan barang milik daerah (bagi subbag umum) pun makin bertambah, dari 89 responden terdapat 60 orang responden (67,4%) yakni terbanyak menjawab setuju, 31 orang atau 34,8 persennya menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,22, hal tersebut berarti sebagian besar responden setuju bahwa pengalaman kerja dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 4.6 dan penjelasan tersebut diatas, bahwa dari 89 responden, yang menjawab setuju sebanyak 54,1% dan sangat setuju sebanyak 30,3 %, sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5,3 %, sangat tidak setuju sebesar 0,3 % dan netral sebesar 9,8%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 54 % responden setuju dan lebih dari 30% responden sangat setuju bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia, terutama dari sisi Pendidikan (pertanyaan quisioner ke 2 dengan skor rata-rata diatas 4), Pelatihan (pertanyaan quisioner ke 4, 5 dan 6 dengan skor rata-rata diatas 4), Kemampuan (pertanyaan quisioner ke 9, dengan skor rata-rata diatas 4) dan Pengalaman (pertanyaan quisioner ke 11, dengan skor rata-rata diatas 4),

sementara sisanya sebanyak 15 % responden berpendapat netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia, terutama pada sisi Pendidikan (pertanyaan quisioner ke 1 dan 3 dengan skor rata-rata dibawah 4), Kemampuan (pertanyaan quisioner ke 7 dan 8, dengan skor rata-rata dibawah 4) dan Pengalaman (pertanyaan quisioner ke 10, dengan skor rata-rata dibawah 4).

- b. Deskripsi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator komitmen

Tabel 4.7 Deskripsi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator Komitmen

No	Item pertanyaan	Skor Jawaban Responden										Rata-rata
		1		2		3		4		5		
		F	%	F	%	F	%	F	%	f	%	
1	Item 1 (X2,1)	-	-	-	-	4	4.1	49	50.0	45	45.9	4.42
2	Item 2 (X2,2)	-	-	-	-	4	4.1	58	59.2	36	36.7	4.33
3	Item 3 (X2,3)	-	-	1	1.0	4	4.1	51	52.0	42	42.9	4.37
4	Item 4 (X2,4)	1	1	4	4.1	7	7.1	46	46.9	40	40.8	4.22
5	Item 5 (X2,5)	-	-	3	3.1	4	4.1	45	45.9	46	46.9	4.37
Total		1		8		23		249		209		490
Persentase (%)		0,2		1,6		4,7		50,8		42,6		100

Sumber : data primer (diolah :2013)

Berdasarkan 4.7, dari jawaban responden terhadap item dari Komitmen (X2) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item sub Saya merasa *bangga* jika dapat melakukan tugas dengan baik demi terciptanya tata pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) (X2,1), dari 89 responden terdapat 49 orang responden

- (50,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 45 orang atau 45,9 persennya menyatakan sangat setuju, dan 4,1% menyatakan netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,42, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
2. Pada item sub Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh walaupun saya harus belajar lebih giat untuk memahami peraturan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (bagi Subbag Keuangan) dan prosedur pengelolaan aset (bagi Subbag Umum) (X2,2), dari 89 responden sebanyak 58 orang responden (59,2%) yakni terbanyak menjawab setuju, 36 orang atau 36,7% menyatakan sangat setuju dan sisanya 4 orang responden menjawab netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,33, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
3. Pada item sub Saya akan terus berusaha untuk melakukan tugas dan fungsi dengan baik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dari 89 responden terdapat 51 orang (52,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 42 orang atau 42,9 persennya menyatakan sangat setuju, 4,1% netral dan 1,0% menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,37, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
4. Pada item sub Saya akan tetap melakukan tugas dan fungsi dengan baik dan mentaati segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset, sekalipun tidak ada pengawasan dari atasan, dari 89 responden terdapat 46 orang responden (46,9%) yakni terbanyak menjawab setuju, 40 orang atau 40,8 persennya menyatakan sangat setuju, serta 7,1% netral dan 4,1% menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-

rata menunjukkan nilai sebesar 4,22, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.

5. Pada item sub Saya akan melakukan tugas dan fungsi dengan segala kemampuan yang saya miliki, tanpa harus mendapatkan pujian dari orang lain dari 89 responden terdapat 46 orang responden (46,9%) yakni terbanyak menjawab sangat setuju, 45 orang atau 45,9% menyatakan setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,37, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.

Berdasarkan tabel 4.7 dan penjelasan tersebut diatas, bahwa dari 98 responden, yang menjawab setuju sebanyak 50,8% dan sangat setuju sebanyak 42,6 %, sementara responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1,6 %, sangat tidak setuju sebesar 0,2 % dan netral sebesar 4,7%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50 % responden setuju dan lebih dari 42% responden sangat setuju bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh komitmen, dengan rata-rata skor jawaban responden diatas nilai 4, sementara sisanya sebanyak 8% responden berpendapat netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh komitmen.

c. Deskripsi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator SPI

Tabel 4.8 Deskripsi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator SPI

No	Item pertanyaan	Skor Jawaban Responden										Rata-rata
		1		2		3		4		5		
		F	%	F	%	f	%	f	%	F	%	
1	Item1 (X3,1)	-	-	2	2.0	7	7.1	62	63.3	27	27.6	4.16
2	Item2 (X3,2)	2	2	8	8.2	14	14.3	53	54.1	21	21.4	3.85
3	Item3 (X3,3)	-	-	1	1.0	10	10.2	66	67.3	21	21.4	4.09
4	Item 4 (X3,4)	-	-	2	2.0	5	5.1	48	49.0	43	43.9	4.35
5	Item 5 (X3,5)	-	-	2	2.0	3	3.0	54	55.1	39	39.8	4.33
6	Item 6 (X3,6)	-	-	-	-	-	-	61	62.2	37	37.8	4.38
7	Item 7 (X3,7)	-	-	-	-	2	2.0	33	33.7	63	64.3	4.62
8	Item 8 (X3,8)	-	-	-	-	-	-	38	38.8	60	61.2	4.61
9	Item 9 (X3,9)	-	-	1	1.0	5	5.1	48	49.0	44	44.9	4.38
10	Item10 (X3,10)	-	-	1	1.0	4	4.1	51	52.0	42	42.9	4.37
11	Item11 (X3,11)	1	1	-	-	7	7.1	64	65.3	26	26.5	4.16
12	Item12 (X3,12)	-	-	4	4.1	4	4.1	49	50.0	45	45.9	4.30
13	Item13 (X3,13)	-	-	2	2.0	6	6.1	51	52.0	39	39.8	4.30
Total		3		23		67		678		507		1.278
Persentase (%)		0,2		1.8		5,2		53,1		39,7		100

Sumber : data primer (diolah : 2013)

Berdasarkan 4.8, dari jawaban responden terhadap item dari komitmen (X3) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item sub Tiap pegawai di bagian keuangan/akuntansi dan bagian umum mempunyai tupoksi yang berbeda (X3,1), dari 89 responden terdapat 62 orang responden (63,3%) yakni terbanyak menjawab setuju, 27 orang atau 27,6 persennya menyatakan sangat setuju dan 7,7% lainnya netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,16, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.

2. Pada item sub Jika saya berhalangan hadir, tugas saya dapat digantikan oleh staf lain berdasarkan surat penunjukan / persetujuan Kepala SKPD (X3,2), dari 89 responden terdapat 53 orang responden (54,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 21 orang atau 21,4 persennya menyatakan sangat setuju, 14,3% netral, 8,2% tidak setuju serta 2% menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,85, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.
3. Pada item sub Menurut pendapat saya pemisahan tugas dan fungsi di bagian keuangan / akuntansi dan bagian umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Surat Keputusan Bupati) (X3,3), dari 89 responden terdapat 66 orang responden (66,7%) yakni terbanyak menjawab sangat setuju, 21 orang atau 21,4 persennya menyatakan setuju, serta 10,2% netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,09, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
4. Pada item sub Transaksi keuangan yang menyangkut pengeluaran tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada otorisasi (paraf) dari pejabat yang berwenang (X3,4), dari 89 responden terdapat 48 orang responden (49,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 43 orang atau 43,9 persennya menyatakan sangat setuju, serta 5,1% netral dan sisanya 2,0% tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,35. hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.

5. Pada item sub Transaksi keuangan dapat dilaksanakan jika telah diotorisasi oleh beberapa pejabat berwenang, minimal kepala bidang dan kepala sub bagian keuangan (X3,5), dari 89 responden terdapat 54 orang responden (55,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 39 orang atau 39,8 persennya menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,33, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
6. Pada item sub Setiap transaksi yang telah diotorisasi oleh pejabat berwenang, dapat diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku (X3,6), dari 89 responden terdapat 61 orang responden (62,2%) yakni terbanyak menjawab setuju, 37 orang atau 37,8 persennya menyatakan setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,38, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
7. Pada item sub Pelaksanaan transaksi yang menyangkut pengeluaran kas harus didukung dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah seperti kwitansi, faktur pembelian, faktur pajak dan lain-lain (X3,7), dari 89 responden terdapat 63 orang responden (64,3%) yakni terbanyak menjawab sangat setuju, 33 orang atau 3,7 persennya menyatakan setuju seta sisanya 2 orang responden menjawab netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,62, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
8. Pada item sub Menurut pendapat saya, bukti-bukti pendukung transaksi yang dimiliki wajib disimpan sebagai dokumen dan dipelihara berkala

untuk kepentingan pemeriksaan (X3,8), dari 89 responden terdapat 60 orang responden (61,2%) yakni terbanyak menjawab sangat setuju, 38 orang atau 38,8 persennya menyatakan setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,61, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.

9. Pada item sub Setiap transaksi keuangan yang telah diproses dicatat dengan segera setelah diterima dalam buku kas umum maupun dalam buku pembantu lainnya (bagi subbag keuangan). Setiap barang lainnya (bagi subbag keuangan). Setiap barang milik daerah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (bagi subbag umum) (X3,9), dari 89 responden terdapat 48 orang responden (49,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 44 orang atau 44,9 persennya menyatakan sangat setuju 5,1% netral serta 1% menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,38, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
10. Pada item sub Setiap transaksi dicatat sesuai dengan nomor kegiatan dan nomor rekeningnya, dalam buku kas umum maupun dalam buku pembantu lainnya (bagi subbag keuangan). Setiap barang memiliki daerah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (bagi subbag umum) (X3,20), dari 89 responden terdapat 51 orang responden (52,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 42 orang atau 42,9 persennya menyatakan sangat setuju, 1% tidak setuju, serta 4,1% menjawab netral. Berdasarkan

hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,37, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.

11. Pada item sub Saya mendapat pemeriksaan dan pembinaan dari Aparat Inspektorat Kabupaten Dompu dalam penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah di lingkup SKPD (X3,21), dari 89 responden terdapat 64 orang responden (65,3%) yakni terbanyak menjawab setuju, 26 orang atau 26,5 persennya menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,16, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
12. Pada item sub Menurut pendapat saya, pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dompu dapat menurunkan tingkat kesalahan/ penyimpangan yang mungkin terjadi tiap tahun dalam pengelolaan barang milik daerah di lingkup SKPD (X3,22), dari 89 responden terdapat 49 orang responden (50,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 41 orang atau 41,8 persennya menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,30, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
13. Pada item sub Saya mendapatkan pembinaan dari Inspektorat Kabupaten Dompu untuk mengurangi / memperbaiki penyebab dari penyimpangan yang ada sehingga penyimpangan yang sama tidak terjadi lagi di tahun mendatang (X3,23), dari 89 responden terdapat 51 orang responden (52,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 39 orang atau 39,8 persennya menyatakan sangat setuju, 2% tidak setuju serta sisanya 6 orang

responden atau 6,1% menjawab netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,30, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.

Berdasarkan tabel 4.8 dan penjelasan tersebut diatas, bahwa dari 89 responden, yang menjawab setuju sebanyak 53,1% dan sangat setuju sebanyak 39,7 %, sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1,8 %, sangat tidak setuju sebesar 0,2 % dan netral sebesar 5,2%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 53 % responden setuju dan lebih dari 39% responden sangat setuju bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, terutama dari sisi pemisahan fungsi (pertanyaan quisioner ke 1 dan 3 dengan skor rata-rata diatas 4), pendelegasian wewenang (pertanyaan quisioner ke 4, 5 dan 6 dengan skor rata-rata diatas 4), dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah (pertanyaan quisioner ke 7 dan 8, dengan skor rata-rata diatas 4), pencacatan yang akurat dan tepat waktu (pertanyaan quisioner ke 9 dan 10, dengan skor rata-rata diatas 4), peran pengawas internal pemda (pertanyaan quisioner ke 11,12 dan 13, dengan skor rata-rata diatas 4), sementara sisanya sebanyak 8 % responden berpendapat netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, khususnya pada pemisahan fungsi (pertanyaan quisioner ke 2, dengan skor rata-rata dibawah 4).

d. Deskripsi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator pengelolaan asset

Tabel 4.9 Deskripsi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada indikator asset

No	Pertanyaan	Skor Jawaban Responden										Rata-rata
		1		2		3		4		5		
		F	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Item1 X4,1)	1	1	2	2.0	3	3.1	67	68.4	25	25.5	4.15
2	Item2 X4,2)	-	-	1	1.0	1	1.0	66	67.3	30	30.6	4.28
3	Item3 X4,3)	-	-	3	3.1	5	5.1	61	62.2	29	29.6	4.18
4	Item4 X4,4)	-	-	2	2.0	18	18.4	53	54.1	25	25.5	4.03
5	Item5 X4,5)	-	-	2	2.0	11	11.2	60	61.2	25	25.3	4.10
6	Item6 X4,6)	-	-	1	1.0	19	19.4	52	53.1	26	26.5	4.05
7	Item7 X4,7)	-	-	1	1.0	29	29.6	41	41.8	26	26.5	3.95
8	Item8 X4,8)	1	1	-	-	18	18.4	49	45.0	27	27.6	4.10
9	Item9 X4,9)	-	-	3	3.1	27	27.6	50	51.0	18	18.4	3.85
10	Item10X4,10)	2	2	2	2.0	18	18.4	45	50.0	27	27.6	3.99
11	Item11(X4,11)	-	-	2	2.0	4	4.1	61	62.2	31	31.6	4.23
12	Item12 (X4,12)	-	-	2	2.0	10	10.2	64	65.3	22	22.4	4.08
13	Item13 (X4,13)	-	-	1	1.0	23	23.5	56	57.1	18	18.4	3.93
14	Item14 (X4,14)	-	-	3	3.1	16	16.3	50	51.0	29	29.6	4.07

15	Item15 (X4,15)	-	-	2	2.0	2	2.0	65	66.3	29	29.6	4.23
16	Item16 (X4,16)	-	-	3	3.1	10	10.2	59	60.2	26	26.5	4.10
17	Item17 (X4,17)	1	1	3	3.1	17	17.3	52	53.1	25	25.5	3.99
18	Item18 (X4,18)	-	-	2	2.0	3	3.1	56	57.1	37	37.8	3.69
19	Item19 (X4,19)	-	-	2	2.0	3	3.1	56	57.1	37	37.8	4.31
20	Item20 (X4,20)	1	1	14	14.3	16	16.3	50	51.0	15	15.3	3.81
21	Item21 (X4,21)	2	2	7	7.1	16	16.3	61	62.2	12	12.2	3.76
22	Item22 (X4,22)	-	-	-	-	11	11.2	62	63.3	25	25.5	4.14
23	Item23 (X4,23)	-	-	-	-	3	3.1	71	72.4	24	24.5	4.21
24	Item24 X4,24)	-	-	4	4.1	7	7.1	77	78.6	10	10.2	3.95
25	Item25 X4,25)	-	-	1	1.0	9	9.2	78	79.6	10	10.2	3.99
Total		8		63		299		1.464		608		2.440
Persentase		0,3		2,6		12,2		59,9		24,9		100

Sumber : data primer (diolah :2013)

Berdasarkan 4.9, dari jawaban responden terhadap item dari pengelolaan asset (X4) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item sub perencanaan kebutuhan barang harus disusun setiap tahunnya dalam rencana kerja anggaran (RKA) setelah memperhatikan ketersediaan barang yang ada (X4,1), dari 89 responden terdapat 67

orang responden (68,4%) yakni terbanyak menjawab setuju, 25 orang atau 25,5 persennya menyatakan sangat setuju, sedangkan 3,1% menjawab netral, 2,0% tidak setuju dan 1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,15, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.

2. Pada item sub penyusunan perencanaan kebutuhan barang harus berdasarkan pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga (X4,2) dari 89 responden terdapat 66 orang responden (67,3%) yakni terbanyak menjawab setuju, 29 orang atau 29,6 persennya menyatakan sangat setuju, 1% netral, serta sisanya 1% menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 28, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
3. Pada item sub pengadaan barang selalu dilakukan secara terbuka dan transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar (X4,3), dari 89 responden terdapat 61 orang responden (62,2%) yakni terbanyak menjawab setuju, 29 orang atau 29,6 persennya menyatakan sangat setuju, dan 5,1% menyatakan netral, serta sisanya 3,1% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,18, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
4. Pada item sub pelaksanaan pemilihan penyediaan barang telah dilakukan sesuai prosedur mulai dari perencanaan, pemeliharaan hingga penetapannya (X4,4), dari 89 responden terdapat 53 orang responden (54,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 25 orang atau 25,5 persennya

menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,03, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.

5. Pada item sub usul penggunaan barang kepada pengelola barang (sekda) harus dibuat agar status penggunaan barang tersebut dapat ditetapkan untuk mendukung penyelenggaraan tupoksi SKPD (X4,5), dari 89 responden terdapat 60 orang responden (61,2%) yakni terbanyak menjawab setuju, 25 orang atau 25,5% persennya menyatakan sangat setuju, 11,2% netral serta sisanya 2% menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,10, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
6. Pada item sub sanksi pencabutan status penggunaan barang dapat dikenakan bila SKPD tidak menggunakan barang untuk mendukung tupoksi SKPD (X4,6) dari 89 responden terdapat 52 orang responden (53,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 26 orang atau 26,5 persennya menyatakan sangat setuju, serta 19 orang responden menjawab netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,95, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.
7. Pada item sub Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk penyewaan maupun pinjam pakai dilakukan dengan persetujuan dari pengelola barang (Sekda) dan pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah (Bupati) (X4,7), dari 89 responden terdapat 41 orang responden (41,8%) yakni terbanyak menjawab setuju, 26 orang atau 26,5% menyatakan sangat setuju, serta 29,6% netral. Berdasarkan hasil rata-rata

menunjukkan nilai 3,95, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.

8. Pada item sub Pemanfaatan barang milik daerah (Penyewaan maupun pinjam pakai) dituangkan dalam surat perjanjian yang memuat pihak-pihak yang terlibat, jenis dan jumlah barang, jangka waktu, besaran sewa dan lain-lain (X4,8), dari 89 responden terdapat 48 orang responden (49,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 31 orang atau 31,6 persennya menyatakan sangat setuju, serta 18,4% netral dan sisanya 1% menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,10, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
9. Pada item sub Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dilakukan bila dana dalam APBD tidak cukup tersedia untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan barang milik daerah tersebut (X4,9), dari 89 responden terdapat 50 orang responden (51,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 27 orang atau 27,6 persennya menyatakan netral, serta 18,4% menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,85, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.
10. Pada item sub Pengamanan barang milik daerah yang ada di SKPD telah dilakukan secara administrasi dan fisik (X4,10), dari 89 responden terdapat 49 orang responden (50,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 27 orang atau 27,6 persennya menyatakan sangat setuju, serta 18 responden menjawab netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan

nilai sebesar 3,99, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.

11. Pada item sub Menurut pendapat saya, setiap kepemilikan barang milik daerah harus diamankan secara hukum melalui bukti kepemilikan (sertifikat) yang diatas namakan pemerintah daerah (X4,11), dari 89 responden terdapat 61 orang responden (62,2%) yakni terbanyak menjawab setuju, 31 orang atau 31,6 persennya menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,23, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
12. Pada item sub Pemeliharaan atas setiap barang milik daerah yang ada di SKPD harus sesuai Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPM) (X4,12), dari 89 responden terdapat 64 orang responden (65,3%) yakni terbanyak menjawab setuju, 22 orang atau 22,4 persennya menyatakan sangat setuju 10 orang responden menjawab netral, serta sisanya 2 orang menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,08, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
13. Pada item sub Menurut pendapat saya, penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah telah dilakukan dengan perpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X4,13), dari 89 responden terdapat 56 orang responden (57,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 23 orang atau 23,5 persennya menyatakan netral, serta 22,4% menjawab sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata

menunjukkan nilai sebesar 3,93, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.

14. Pada item sub Selain itu penilaian barang milik daerah, penilaian dapat dilakukan oleh penilai independen yang ditetapkan oleh Sekda dan atau Bupati (X4,14), dari 89 responden terdapat 50 orang responden (51,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 29 orang atau 29,6 persennya menyatakan sangat setuju, serta 2% menjawab netral dan sisanya 2% menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,07, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
15. Pada item sub SKPD mengajukan penetapan penghapusan barang milik daerah yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang (Sekda) setelah mendapatkan persetujuan Bupati (X4,15), dari 89 responden terdapat 65 orang responden (66,3%) yakni terbanyak menjawab setuju, 29 orang atau 29,6 persennya menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,23, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
16. Pada item sub Barang milik daerah yang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipindah tangankan ditindak lanjuti dengan pemusnahan setelah penetapan penghapusannya disetujui (X4,16), dari 89 responden terdapat 59 orang responden (60,2%) yakni terbanyak menjawab setuju, 26 orang atau 26,5 persennya menyatakan sangat setuju, serta 10,2% menyatakan netral. Berdasarkan hasil rata-rata

menunjukkan nilai sebesar 4,10, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.

17. Pada item sub Pemindah tanganan barang milik daerah dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah maupun pernyataan modal pemerintah harus melalui prosedur persetujuan DPRD (X4,17), dari 89 responden terdapat 52 orang responden (53,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 25 orang atau 25,5 persennya menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,99, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.
18. Pada item sub Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan tanpa persetujuan DPRD bila diperuntukkan bagi kepentingan umum atau tidak sesuai dengan tata ruang wilayah (X4,18), dari 89 responden terdapat 50 orang responden (51,0%) yakni terbanyak menjawab setuju, 17 orang atau 17,3 persennya menyatakan sangat setuju, serta 16 orang responden menjawab netral, dan sisanya 16 responden menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,69, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.
19. Pada item sub Setiap barang milik daerah yang ada di SKPD harus di daftar dan dicatat ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) menurut penggolongan dan kodefikasinya (X4,19), dari 89 responden terdapat 56 orang responden (57,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 37 orang atau 37,8 persennya menyatakan setuju serta 3 reponden menjawab sangat netral. Berdasarkan hasil rata-

rata menunjukkan nilai sebesar 3,69, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.

20. Pada item sub Menurut daya, penyimpanan dokumen kepemilikan barang milik daerah telah dilaksanakan dengan tertib (X4,20), dari 89 responden terdapat 56 orang responden (57,1%) yakni terbanyak menjawab setuju, 21 orang atau 21,4 persennya menyatakan netral, serta 15 responden menjawab sangat setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,81, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.
21. Pada item sub SKPD melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah yang ada di SKPD sekurang-kurangnya 5 tahun sekali kecuali untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, SKPD melakukan inventarisasi setiap tahunnya (X4,21), dari 89 responden terdapat 61 orang responden (61,2%) yakni terbanyak menjawab setuju, 16 orang atau 16,3 persennya menyatakan netral serta 12 responden menjawab sangat setuju, 7 orang menjawab tidak setuju dan 2 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,76, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.
22. Pada item sub SKPD harus menyusun Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan laporan Barang pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang (Sekda) sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah (X4,22), dari 89 responden terdapat 62 orang responden (62,3%) yakni terbanyak menjawab setuju,

- 25 orang atau 25,5 persennya menyatakan sangat setuju, dan sisanya 11,4% menjawab netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,14, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
23. Pada item sub Mutasi barang bertambah dan atau berkurang di SKPD tiap semester selalu di catat dengan tertib dalam Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang (X4,23), dari 89 responden terdapat 71 orang responden (72,4%) yakni terbanyak menjawab setuju, 24 orang atau 24,5 persennya menyatakan sangat setuju, serta sisanya 3% menjawab netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 4,21, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab setuju.
24. Pada item sub Aparat pengawas melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah di SKPD (X4,24), dari 89 responden terdapat 77 orang responden (78,6%) yakni terbanyak menjawab setuju, 10 orang atau 10,2 persennya menyatakan sangat setuju, dan 7,1% menjawab netral. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,95, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral.
25. Pada item sub Hasil audit aparat pengawas disampaikan kepada pengelola barang (sekda) dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (X4,25), dari 89 responden terdapat 78 orang responden (78,9%) yakni terbanyak menjawab setuju, 10 orang atau 10,2 persennya menyatakan sangat setuju serta 9 espponden menjawab netral dan sisanya 1 orang responden menjawab neral. Berdasarkan hasil rata-

rata menunjukkan nilai sebesar 3,99, hal tersebut berarti sebagian besar responden menjawab netral

Berdasarkan tabel 4.9 dan penjelasan tersebut diatas, bahwa dari 89 responden, yang menjawab setuju sebanyak 59,9% dan sangat setuju sebanyak 24,9 %, sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2,6 %, sangat tidak setuju sebesar 0,3 % dan netral sebesar 12,2%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 59 % responden setuju dan lebih dari 24% responden sangat setuju bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan aset, terutama dari sisi perencanaan kebutuhan dan penganggaran (pertanyaan quisioner ke 1 dan 2, dengan skor rata-rata diatas 4), pengadaan (pertanyaan quisioner ke 3 dan 4 dengan skor rata-rata diatas 4), penggunaan (pertanyaan quisioner ke 5 dan 6, dengan skor rata-rata diatas 4), pemanfaatan (pertanyaan quisioner ke 8, dengan skor rata-rata diatas 4), pengamanan dan pemeliharaan (pertanyaan quisioner ke 11, dan 12, dengan skor rata-rata diatas 4), penilaian (pertanyaan quisioner ke 15 dan 14, dengan skor rata-rata diatas 4), penatausahaan (pertanyaan quisioner ke 19, 22 dan 23, dengan skor rata-rata diatas 4), sementara sisanya sebanyak 15 % responden berpendapat netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan aset, khususnya pada sisi penggunaan (pertanyaan quisioner ke 7, dengan skor rata-rata dibawah 4), pemanfaatan (pertanyaan quisioner ke 9 dan 10, dengan skor rata-rata dibawah 4), penilaian (pertanyaan quisioner ke 13, dengan skor rata-rata dibawah 4), pemindahtangan (pertanyaan quisioner ke 17 dan, dengan skor rata-rata dibawah 4), penatausahaan (pertanyaan quisioner ke 20

dan 21, dengan skor rata-rata dibawah 4), pembinaan, pengawasan dan pengendalian (pertanyaan quisioner ke 24 dan 25 dengan skor rata-rata dibawah 4).

e. Deskripsi pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Tabel 4.10 Deskripsi pengelolaan keuangan pemerintah daerah

No	Item Pertanyaan	Skor Jawaban Responden				Rata-rata
		0		1		
		F	%	F	%	
1	Item1	3	3,1	95	96,5	0.97
2	Item2	39	39,8	59	60,2	0.60
3	Item3	4	4,1	94	95,9	0.96
4	Item4	3	3,1	95	96,9	0.97
5	Item5	5	5,1	93	94,9	0.95
6	Item6	6	6,1	92	93,9	0.94
7	Item7	10	10,2	88	89,8	0.90
8	Item8	5	5,1	93	94,9	0.95
9	Item9	1	1	97	99	0.99
10	Item10	12	12,2	86	87,8	0.88
11	Item11	8	8,2	90	91,8	0.92
12	Item12	8	8,2	90	91,8	0.92
13	Item13	4	4,1	94	95,5	0.96
14	Item14	2	2	96	98	0.98
15	Item15	7	7,1	91	92,9	0.93
16	Item16	8	8,2	90	91,8	0.92
17	Item17	16	16,3	82	83,7	0.84
18	Item18	10	10,2	88	89,8	0.90
19	Item19	4	4,1	94	95,9	0.96
Total		155		1.707		1.862
Persentase		8,3		91,7		100

Sumber : data primer (diolah :2013)

Berdasarkan 4.10, dari jawaban responden terhadap item dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada item sub Informasi dalam laporan keuangan SKPD pada tahun sebelumnya dapat digunakan dalam penyusunan anggaran untuk tahun yang akan datang, sebanyak 95 responden atau sekitar 96,5% menjawab Ya dan sisanya 3 responden (3,1%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,97 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
2. Pada item sub Penyampaian laporan keuangan SKPD dilakukan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebanyak 59 responden atau sekitar 60,2% menjawab Ya dan sisanya 39 responden (39,8%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,60 yang berarti sebagian besar dari responden menjawab Ya.
3. Pada item sub Informasi keuangan segera tersedia setiap pimpinan membutuhkannya sebanyak 95 responden atau sekitar 96,9% menjawab Ya dan sisanya 3 responden (3,1%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,97 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
4. Pada item sub laporan keuangan yang di sajikan terdiri dari Neraca, Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sebanyak 59 responden atau sekitar 60,2% menjawab Ya dan sisanya 39 responden

(39,8%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai 0,60, yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.

5. Pada item sub laporan realisasi anggaran harus menyajikan secara lengkap informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan secara tersanding antara anggaran dan realisasinya, sebanyak 94 responden atau sekitar 95,9% menjawab Ya dan sisanya 4 responden (4,1%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,95, yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
6. Pada item sub laporan neraca harus menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana secara lengkap dan jelas untuk mengenai posisi pos-pos tersebut pada tangga; tertentu, sebanyak 92 responden atau sekitar 93,9% menjawab Ya dan sisanya 6 responden (6,1%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,94 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
7. Pada item sub Laporan Catatan Atas laporan Keuangan, saya harus memuat secara lengkap dan jelas mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, pencapaian target APBD, pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi lain yang diperlukan, sebanyak 88 responden atau sekitar 89,8% menjawab Ya dan sisanya 10 responden (10,2%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,90 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.

8. Pada item sub Setiap transaksi selalu diklasikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri No. 13 Tahun 2006), sebanyak 93 responden atau sekitar 94,9% menjawab Ya dan sisanya 5 responden (5,1%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,95 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
9. Pada item sub Setiap transaksi yang disajikan telah didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meyakinkan para pengguna laporan keuangan , sebanyak 99 responden atau sekitar 99,0% menjawab Ya dan sisanya 1 responden (1%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,99 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
10. Pada item sub Menurut pendapat saya, pengujian yang dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda akan menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda, sebanyak 86 responden atau sekitar 87,8% menjawab Ya dan sisanya 12 responden (12,2%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,88 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
11. Pada item sub Laporan keuangan harus disusun dan diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan piha tertentu, sebanyak 90 responden atau sekitar 91,8% menjawab Ya dan sisanya 8 responden (8,2%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,92 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.

12. Pada item sub Laporan keuangan harus disusun dan diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu, sebanyak 90 responden atau sekitar 91,8% menjawab Ya dan sisanya 8 responden (8,2%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,92 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
13. Pada item sub Pengguna laporan keuangan dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk melihat pencapaian target anggaran dalam laporan realisasi anggaran, sebanyak 94 responden atau sekitar 95,5% menjawab Ya dan sisanya 4 responden (4,1%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,96 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
14. Pada item sub Pengguna laporan keuangan dapat melakukan perbandingan laporan realisasi anggaran SKPD untuk tahun 2011 dengan 2012 untuk melihat apakah terjadi peningkatan/penurunan dalam pencapaian target anggaran, sebanyak 96 responden atau sekitar 98,0% menjawab Ya dan sisanya 2 responden (2%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,98 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
15. Pada item sub Perkembangan aset dapat diketahui dengan melakukan perbandingan aset SKPD tahun 2011 dengan tahun 2012 dalam neraca, sebanyak 91 responden atau sekitar 92,9% menjawab Ya dan sisanya 7 responden (7,1%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,93 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.

16. Pada item sub Kinerja SKPD dapat diketahui dengan membandingkan laporan keuangan SKPD tahun lalu dengan tahun sekarang, sebanyak 90 responden atau sekitar 91,8% menjawab Ya dan sisanya 8 responden (8,2%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,92 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
17. Pada item sub Nama akun, komponen dan struktur laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SAP) akan membantu para pengguna dalam memahami laporan keuangan, sebanyak 82 responden atau sekitar 83,7% menjawab Ya dan sisanya 16 responden (16,3%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,84 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
18. Pada item sub Menurut pendapat saya, laporan keuangan menjadi tidak bermanfaat bila pemakai tidak memahami informasi yang terkandung didalamnya, sebanyak 88 responden atau sekitar 89,8% menjawab Ya dan sisanya 10 responden (10,2%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,90 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.
19. Pada item sub Menurut pendapat saya, laporan keuangan sudah jelas diketahui keuangannya, namun dapat menjadi tidak bermanfaat bila pemakai tidak berusaha memahami / belajar memahaminya, sebanyak 94 responden atau sekitar 95,9% menjawab Ya dan sisanya 4 responden (4,1%) menjawab tidak. Berdasarkan hasil rata-rata diperoleh nilai sebesar 0,96 yang berarti sebagian besar responden menjawab Ya.

Berdasarkan tabel 4.10, dan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden terhadap item dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai besar menjawab ya yaitu sebanyak 91,7% dan sisa 8,3% yang menjawab tidak daerah, ini artinya sebagian besar responden memahami karakteristik laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, karena responden merupakan pejabat/pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada masing-masing SKPD.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal. Untuk mengujinya dapat dilakukan dengan grafik dan melihat besaran *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil penelitian adalah apakah residual terdistribusi normal atau tidak, dapat terlihat pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.11 : hasil uji Kolmogorov-Smirnov Z

Keterangan	N	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Model	98	0,806	0,534

Sumber : data Primer (diolah :2013)

Berdasarkan pada tabel 4.11 di atas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, dengan melihat nilai *Kolmogroff Smirnov* dan masing-masing variabel tidak signifikan pada 0,05, karena *probability* lebih

besar dari 0.05. Hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik harus bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil pendeteksian adanya multikolinearitas dapat diketahui pada Tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
X1	0,710	1,408
X2	0,522	1,917
X3	0,709	1,410
X4	0,740	1,352

Sumber : data primer diolah (2013)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.12 terlihat di mana nilai VIF tidak melebihi angka 10 dan nilai *tolerance* tidak ada yang kurang dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tidak konstan. Asumsi varian dikatakan konstan apabila distribusi residual tidak dipengaruhi oleh besarnya variabel independen. Penelitian ini menggunakan uji *park* untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Untuk uji *park*, jika signifikansi korelasi lebih dari 0,05, maka pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 13 : hasil uji heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig.
X1	0,505	0,615
X2	0,121	0,904
X3	0,288	0,774
X4	0,139	0,890

Sumber : data primer diolah (2013)

Berdasarkan Tabel 4.13. di atas dapat dilihat koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, pada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

6. Hasil Analisis Regresi

a. Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.433 ^a	.188	.347

Sumber : data primer diolah (2013)

Hasil pengolahan data, besarnya *adjusted R²* adalah sebesar 0,347, hal ini berarti 34,7% variasi variabel dependen pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (kapasitas SDM, komitmen, sistem pengendalian intern (SPI), dan pengelolaan asset. Sementara itu, sisanya 55,3% (100% - 34,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

b. Uji parsial (Uji t)

Uji regresi parsial dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen kapasitas SDM, komitmen, sistem pengendalian intern (SPI),

dan pengelolaan asset mempunyai pengaruh secara individual terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Y) sebagai variabel *dependent*

Tabel 4.15 : Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Model		
	Beta	t	Sig.
(Constant)	.083		
X1	.068	3,089	0,003
X2	.004	0,179	0,859
X3	.061	2,946	0,004
X4	.063	2,324	0,022

Sumber : Data Primer diolah (2013)

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, dari empat variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi, hanya komitmen saja yang tidak berpengaruh secara terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas yang lebih besar dari 0,05. Sementara itu, variabel SDM, SPI, dan pengelolaan asset masing masing berpengaruh terhadap variabel Y hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari probabilitas 0,05 yakni secara berurutan sebesar 0,003, 0,004, dan 0,022. Selain itu masing-masing juga memiliki Beta yakni sebesar 0,068, 0,061, serta 0,063.

c. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian dengan menggunakan uji signifikansi simultan (uji statistik F) dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen berupa kapasitas SDM, komitmen, sistem pengendalian intern (SPI), dan pengelolaan asset berpengaruh bersama sama terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Y). Tabel Uji F dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4.16. Uji Simultan (Uji F)

Model	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.056	5.378	.000 ^b
Residual	.010		
Total			

Sumber : data primer (diolah :2013)

Dari uji ANOVA atau *F test* didapati nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau dapat dikatakan bahwa variabel independen (kapasitas SDM, komitmen, sistem pengendalian intern (SPI), dan pengelolaan asset) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pengaruh kapasitas SDM, komitmen, sistem pengendalian intern (SPI), dan pengelolaan asset terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Secara umum hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel independen kapasitas SDM, komitmen, sistem pengendalian intern (SPI), dan pengelolaan asset mempengaruhi tingkat pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara bersama-sama (simultan). Hal tersebut dibuktikan melalui signifikansi statistic yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_a diterima dan H_o ditolak. H_a adalah terdapat pengaruh secara bersama –sama variabel independen kapasitas SDM, komitmen, sistem pengendalian intern (SPI), dan pengelolaan asset terhadap pengelolaan

keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *signifikan* positif secara simultan dari masing – masing variabel independen (kapasitas SDM, komitmen, sistem pengendalian intern (SPI), dan pengelolaan asset) terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Sementara itu, hasil penelitian ini juga berhasil memperoleh bukti empiris adanya pengaruh secara parsial dari variabel independen (kapasitas SDM, SPI, dan pengelolaan asset) terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Y). hal tersebut dibuktikan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel independen komitmen (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Adapun penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

1. Pengaruh Sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Kapasitas SDM, hipotesis awal penelitian diduga kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian didapat bahwa variabel SDM berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari probability 0,05, dan beta sebesar 0,068. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas dari sumber daya manusia pada SKPD-SKPD yang ada di kabupaten Dompu telah cukup mampu memenuhi kriteria yang diinginkan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten Dompu. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Sumber daya manusia merujuk kepada

orang-orang didalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. sehingga harus dapat dipastikan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Simamora :2011). Selain itu, tingkat kualitas SDM yang dimiliki yang merujuk pada definisi SDM sebagai kesatuan tenaga manusia dalam organisasi akan berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi tersebut guna mencapai tujuan. Hal tersebut juga berlaku pada pemerintah kabupaten Dompu dimana latar belakang pendidikan, pemahaman tentang tugas, pelatihan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki akan mempengaruhi tingkat kecakapan dalam menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia (SDM terhadap terhasilnya pelaporan keuangan yang handal. Namun begitu, Pemerintah kabupaten Dompu dapat lebih meningkatkan lagi kualitas laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada khususnya pada SDM guna lebih meningkatkan lagi kinerja SDM yang dimiliki melalui peningkatan pendidikan, kegiatan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, serta peningkatan pemahaman dan kemampuan dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki terhadap fungsi dan tugas yang diemban.

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Roviyantje (2009) yang menyimpulkan kompetensi SDM berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di setiap Dinas.

Penelitian Warisno (2009) yang menyimpulkan kualitas SDM, berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Penelitian Winidyaningrum (2010) yang menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Budiarto (2011) yang menyatakan Bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Standart Akuntansi Pemerintahan. Penelitian. Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian Indrisari dan nahartoyo(2008) yang menyatakan Kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Mustafa, at el. (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalanpelaporan keuangan. Penelitian wardani (2012) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Komitmen terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Komitmen, dari hasil penelitian diperoleh bahwa variabel komitmen tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,859 yang lebih besar dari probabilitas 0,05 serta beta yang bernilai positif yakni sebesar 0,004. Hal ini mungkin saja disebabkan karena banyak responden pada saat pengisian kuesioner yang menjawab netral, sehingga secara parsial variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Warisno (2009), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Budiarto (2011), yang menyatakan bahwa komitmen berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Komitmen berkaitan dengan keinginan, kemauan dan kesediaan dalam melaksanakan fungsi, tugas serta tanggung jawab sesuai dengan proksi dan jabatan yang diemban, dan dalam hal ini komitmen yang dimaksud adalah komitmen dari SKPD-SKPD yang ada di kabupaten Dompu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas selain harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni juga harus didukung dengan komitmen, kebanggaan, ketaatan serta kecintaan dalam menjalankan fungsi dan tugas. Sehingga peningkatan komitmen akan juga meningkatkan pengelolaan laporan keuangan.

3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

SPI, Dari hasil penelitian ini didapat bahwa variabel SPI berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat signifikansi 0,004

yang lebih kecil dari probabilitas 0,05 serta beta positif sebesar 0,061. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya (H_a) yakni sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian Arfianti (2011) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Wardani (2012), bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Mustafa et al. (2010) yang menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Sistem pengendalian intern (SPI) sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses secara terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang untuk memastikan tujuan organisasi dapat dicapai dengan tindakan dan kegiatan yang efektif dan efisien, memastikan kepatuhan dan ketaatan pelaksanaan terhadap peraturan yang berlaku, dan apabila terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan dapat segera diketahui untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. SPI yang baik dapat menjadi jaminan akan kinerja yang baik pula dari sebuah organisasi. Hasil penelitian ini setidaknya menunjukkan SPI yang diterapkan di kabupaten dompu belum mampu mendukung peningkatan kualitas pelaporan pemerintah kabupaten dompu. Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya kelemahan dalam pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan SPI yang berlaku di lingkungan

pemerintah kabupaten dompu. Pemerintah kabupaten dompu dapat meningkatkan kualitas laporan pengelolaan keuangannya melalui dimensi SPI ini dengan melakukan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan fungsi serta tupoksi kerja yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, serta peran pengawasan internal

4. Pengaruh Pengelolaan asset terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Pengelolaan asset, dari hasil analisis diperoleh bahwa variabel dimensi pengelolaan asset berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat signifikansi 0,022 yang lebih kecil dari probabilitas 0,05 seta beta positif sebesar 0,063. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya (H_a) yakni pengelolaan asset berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mendukung penelitian Wardani (2012), yang menyatakan Bahwa pengelolaan aset berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengelolaan Aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (Pangaribuan dan Sumini, 2010). Hasil penelitain menunjukkan bahwa 25 item pada dimensi

pengelolaan asset ini telah mampu dijalankan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dompu.

5. Dari uji ANOVA atau *F test* didapati nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau dapat dikatakan bahwa variabel independen (kapasitas SDM, komitmen, sistem pengendalian intern (SPI), dan pengelolaan asset) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
6. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel kapasitas SDM menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dari ke empat variabel independen yang dimasukkan dalam model. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang terkecil diantara variabel –variabel lainnya yakni 0,003, serta beta sebesar 0,068.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini berusaha menemukan bukti empiris pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten dompu diukur dari kapasitas SDM, komitmen, SPI, serta pengelolaan asset. Selengkapnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh kapasitas SDM, komitmen, SPI, serta pengelolaan asset terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa sumber daya manusia mempengaruhi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu;
2. Untuk variabel komitmen tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. Hal ini disebabkan masih banyak item dari variabel independen komitmen yang diajukan dalam kuesioner yang belum dapat terpenuhi, sehingga belum mampu meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu diukur dari komitmen.
3. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian Internal mempengaruhi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu.

4. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa Pengelolaan asset mempengaruhi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu.
5. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa sumber daya manusia, komitmen, system pengendalian internal dan pengelolaan asset secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu.
6. Penelitian ini juga berhasil memberikan bukti empiris bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia adalah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

B. Saran

Penelitian ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan-kekurangannya, maka berikut ini diuraikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi Peneliti selanjutnya adalah

1. Penelitian ini menggunakan sampel terbatas dari populasi SKPD sekabupaten dompu saja, sehingga penelitian ini tidak bisa digeneralisasi secara mutlak untuk menilai pemerintah daerah lain di Provinsi NTB, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel yang dimasukkan agar hasil temuan lebih bisa digunakan secara umum di daerah-daerah lain di luar Kabupaten Dompu..

2. Metode pengumpulan data dalam penelitian hanya terbatas pada data primer yang dikumpulkan melalui media kuesioner yang disebar, sehingga data hanya terbatas pada kuesioner yang kembali saja, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode- metode lain dalam pengumpulan data seperti wawancara langsung, serta mendampingi responden pada saat pengisian kuesioner.
3. Penelitian ini hanya terbatas menggunakan empat variabel independen, yaitu Sumber Daya Manusia, Komitmen, Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Asset, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat pula meneliti faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang belum diteliti dalam penelitian ini, misalnya Sarana dan Prasarana penunjang, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan lain-lain sehingga bisa menjadi masukan yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Algifari, (1997). *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi*, Edisi Pertama BPFE, Universitas Bajah Mada Yogyakarta.
- Ahmad Sani dan Masyhuri Mahmud, 2010, *Metodelogi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia*, UIN- MALIKI PRES Malang
- Anggarini, Y. dan Puranto, B.H., 2010, *Anggaran Berabasis Kinerja: Penyusunan Anggaran APBD Secara Komprehensif*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, A. dan Damayanti, T., 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Iksan, Agus,& Harmanti, (2011), *Administarsi Keuangan Publik*, Penerbit Universitas Terbuka.
- Mardi, 2011, *Sistem Informasi Akuntansi*, penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Pangaribuan, Ester., Sumini, 2010, *Pokok-Pokok Pengelolaan BMD*, modul, Kementerian
- Imam, Ghazali, 2009 *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Krina, 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas* .Web.
- Kahaerul Umam, 2009, *Perilaku Organisasi*, Pusta Setia, Bandung
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nunuy N, 2010 *Akuntansi Pemerintah : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Prenada Media Group Jakarta
- Ritonga, I.T., 2011, *Akuntansi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: LKMPD.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung.

TESIS/JURNAL

- Budiarto, 2011. “ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standart akuntansi pemerintahan (studi pada Pemenrintah Kabupaten Lombok Barat)
- Sri Wardani, 2012. “ Pengaruh Sumber daya manusia, pemanfaatan tehnologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada Pemerintah Propinsi NTB)
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo, 2008, Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir),
- Arfianti, Dita 2011, Analisis faktor - Faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi SKPD di Kabupaten Batang).
- Warisno, 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jambi. Pascasarjana Universitas Sumatra Utara Medan
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmamti, 2010. Pengaruh Sumberdaya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (studi empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN).
- BPK RI Perwakilan NTB, 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011,

PERATURAN

- _____ Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- _____ Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- _____ Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

INTERNET

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik :

(<http://mbegedut.blogspot.com/2012/04/tujuan-dan-fungsi-laporan-keuangan.html>)

Ditjen Perbendaharaan ; Akuntansi Berbasis Akrua, Tantangan Besar Pemerintah
<http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=2526>

BPKP Perwakilan Mataram (<http://www.mataram.bpk.go.id/web/?p=2489>).

Komitmen Kerja : <http://www.psikologizone.com/komitmen-kerja/06511611>

Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara, 2011 “Pelatihan penatausahaan aset daerah kab. Konawe utara”
<http://www.bkp.go.id/sultra/berita/read/6889/35-Pelatihan-Penatausahaan-Aset-Daerah-Kab.-Konawe-Utara.bkp>

Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester II BPK 2011 :

<http://www.bpk.go.id/web/files/2011/10/IHPS2011-sem1.pdf>.

Radio Republik Indonesia Mataram :

<http://www.rimataram.com>

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Kuisisioner
2. Lampiran II Tabulasi Data
3. Lampiran III Analisis Deskriptif
4. Lampiran IV Uji Asumsi Klasik
5. Lampiran V Hasil Analisis Regresi

Lampiran I

KUISIONER

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENGELOLAAN ASET TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU)

Kepada Bapak/Ibu/Saudara yang terhormat.

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk penulisan Tugas Akhir Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumberdaya manusia, komitmen, system pengendalian intern dan pengelolaan asset terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan responden terhadap lampiran kuisisioner berikut ini.

PETUNJUK PENGISIAN KUISISIONER

1. Mohon kuisisioner diisi langsung oleh Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab seluruh pernyataan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Kuisisioner ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: bagian I berisi kuisisioner pertanyaan umum tentang identitas diri responden, bagian II berisi kuisisioner tipe alternative jawaban.
3. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh sebab itu, dimohon agar menggunakan tidak ada jawaban yang dikosongkan.
5. Semua tanggapan Bapak/Ibu/Saudara akan dirahasiakan.
6. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara atas partisipasi menyukkseskan penelitian ini.

I. Pertanyaan Umum

Nama SKPD :

Jumlah pegawai di SKPD pada :

a. Subbag keuangan : orang

b. Subbag Umum : orang

1. Nama Responden :

2. Jabatan / Tupoksi : ☐ Kasubbag Keuangan SKPD/PPK
☐ Kasubbag Umum SKPD
☐ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
☐ Pengurus Barang/Penyimpan Barang
☐ Lain-lain, sebutkan.....

3. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita

4. Pendidikan Terakhir :

- ☐ SLTA/ sederajat, jurusan
- ☐ D1, jurusan
- ☐ D3, jurusan
- ☐ S1, jurusan
- ☐ S2, jurusan

5. Lama Bekerja : ☐ 1 – 2 tahun ☐ 10 – 15 tahun
☐ 3 – 5 tahun ☐ 15 – 20 tahun
☐ 5 – 10 tahun ☐ lebih dari 20 tahun

6. Kursus/pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang pernah diikuti (boleh lebih dari satu), di bidang :
- ☐ perencanaan dan penganggaran
 - ☐ pelaksanaan dan penatausahaan anggaran
 - ☐ akuntansi dan pelaporan
7. Kursus/pelatihan akuntansi (pengelolaan keuangan daerah) yang diikuti (boleh lebih dari satu) :
- ☐ Tidak pernah
 - ☐ 1 kali
 - ☐ 2 kali
 - ☐ 3 kali
 - ☐ Lebih dari 3 kali

II. Kuisioner tipe alternative jawaban

Petunjuk pengisian : Bapak/Ibu/Saudara dimohon untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan berikut ini berdasarkan pengalaman, pengamatan dan sepengetahuan Bapak/Ibu/Saudara selama bekerja, yaitu dengan memberikan tanda (X) pada alternative jawaban STS = sangat tidak setuju, TS = tidak setuju, N = Netral, S = setuju, SS = sangat setuju” yang Bapak/Ibu/Saudara anggap paling tepat.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
PENDIDIKAN						
1	Sub bagian keuangan/akuntansi dan umum memiliki staf yang berkualitas (minimal berpendidikan S1) dan jumlah yang cukup.					
2	Menurut pendapat saya, khususnya di bagian keuangan/ akuntansi harus memiliki pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.					
3	Menurut pendapat saya penempatan pegawai di subbagian keuangan saat ini kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.					
PELATIHAN		STS	TS	N	S	SS
1	Selain pendidikan formal, saya membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas.					
2	Saya membutuhkan sosialisasi dan pelatihan setiap terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan (bagi subbag keuangan) dan pengelolaan aset (bagi subbag umum) untuk menambah pengetahuan yang dapat mendukung pekerjaan saya di bagian keuangan/akuntansi dan umum.					
3	Dengan pelatihan di bidang keuangan daerah (bagi subbag keuangan) dan pengelolaan aset (bagi subbag umum), saya memiliki keahlian khusus yang mendukung pekerjaan saya di bagian keuangan / akuntansi dan umum.					

	KEMAMPUAN	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memahami system dan prosedur penatusahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan penatusahaan barang memiliki daerah (bagi subbag umum) untuk mendukung penyusunan laporan keuangan.					
2	Secara umum saya mampu memahami unsure-unsur dalam laporan neraca, realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan (bagi subbag keuangan) dan laporan atas serta mekanisme penyusunannya untuk mendukung penyusunan laporan keuangan.					
3	Saya memahami mekanisme penyusunan laporan neraca, realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan (bagi subbag umum) dan laporan atas pengelolaan barang milik daerah (bagi subbag umum) untuk mendukung penyusunan laporan keuangan.					
	PENGALAMAN	STS	TS	N	S	SS
1	Pegawai dengan masa kerja diatas 5 tahun mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan pegawai dengan kerja di bawah 5 tahun.					
2	Seiring bertambahnya masa kerja saya pengalaman saya dalam penatusahaan keuangan (bagi subbag keuangan) dan penatusahaan barang milik daerah (bagi subbag umum) pun makin bertambah.					

2. KOMITMEN

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa <i>bangga</i> jika dapat melakukan tugas dengan baik demi terciptanya tata pengelolaan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).					
2	Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh walaupun saya harus belajar lebih giat untuk					

	memahami peraturan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (bagi Subbag Keuangan) dan prosedur pengelolaan aset (bagi Subbag Umum).					
3	Saya akan terus berusaha untuk melakukan tugas dan fungsi dengan baik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.					
4	Saya akan tetap melakukan tugas dan fungsi dengan baik dan mentaati segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset, sekalipun tidak ada pengawasan dari atasan.					
5	Saya akan melakukan tugas dan fungsi dengan segala kemampuan yang saya miliki, tanpa harus mendapatkan pujian dari orang lain.					

3. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
	PEMISAHAN FUNGSI					
1	Tiap pegawai di bagian keuangan/akuntansi dan bagian umum mempunyai tupoksi yang berbeda.					
2	Jika saya berhalangan hadir, tugas saya dapat digantikan oleh staf lain berdasarkan surat penunjukan / persetujuan Kepala SKPD.					
3	Menurut pendapat saya pemisahan tugas dan fungsi di bagian keuangan / akuntansi dan bagian umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Surat Keputusan Bupati).					

	PENDELEGASIAN WEWENANG	STS	TS	N	S	SS
1	Transaksi keuangan yang menyangkut pengeluaran tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada otorisasi (paraf) dari pejabat yang berwenang.					
2	Transaksi keuangan dapat dilaksanakan jika telah diotorisasi oleh beberapa pejabat berwenang, minimal kepala bidang dan kepala sub bagian keuangan.					
3	Setiap transaksi yang telah diotorisasi oleh pejabat berwenang, dapat diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku					
	DOKUMENTASI ATAS TRANSAKSI YANG LENGKAP DAN SAH	STS	TS	N	S	SS
1	Pelaksanaan transaksi yang menyangkut pengeluaran kas harus didukung dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah seperti kwitansi, faktur pembelian, faktur pajak dan lain-lain.					
2	Menurut pendapat saya, bukti-bukti pendukung transaksi yang dimiliki wajib disimpan sebagai dokumen dan dipelihara berkala untuk kepentingan pemeriksaan.					
	PENCATATAN YANG AKURAT DAN TEPT WAKTU	STS	TS	N	S	SS
1	Setiap transaksi keuangan yang telah diproses dicatat dengan segera setelah diterima dalam buku kas umum maupun dalam buku pembantu lainnya (bagi subbag keuangan). Setiap barang lainnya (bagi subbag keuangan). Setiap barang milik daerah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (bagi subbag umum).					
2	Setiap transaksi dicatat sesuai dengan nomor kegiatan dan nomor rekeningnya, dalam buku kas umum maupun dalam buku pembantu lainnya (bagi subbag keuangan). Setiap barang memiliki daerah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (bagi subbag umum).					
	PERAN PENGAWAS INTERNAL	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mendapat pemeriksaan dan pembinaan dari Aparat Inspektorat Kabupaten Dompu dalam penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah di lingkup SKPD.					
2	Menurut pendapat saya, pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dompu dapat menurunkan tingkat kesalahan/ penyimpangan yang mungkin terjadi					

	tiap tahun dalam pengelolaan barang milik daerah di lingkup SKPD.					
3	Saya mendapatkan pembinaan dari Inspektorat Kabupaten Dompu untuk mengurangi / memperbaiki penyebab dari penyimpangan yang ada sehingga penyimpangan yang sama tidak terjadi lagi di tahun mendatang.					

4. PENGELOLAAN ASET

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN					
1	Perencanaan kebutuhan barang harus disusun setiap tahunnya dalam rencana kerja anggaran (RKA) setelah memperhatikan ketersediaan barang yang ada.					
2	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang harus berdasarkan pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.					
	PENGADAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut pendapat saya, pengadaan barang selalu dilakukan secara terbuka dan transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar					
2	Menurut pendapat saya, pelaksanaan pemilihan penyediaan barang telah dilakukan sesuai prosedur mulai dari perencanaan, pemeliharaan hingga penetapannya.					
	PENGUNAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Usul penggunaan barang kepada pengelola barang (sekda) harus dibuat agar status penggunaan barang tersebut dapat ditetapkan untuk mendukung penyelenggaraan tupoksi SKPD.					
2	Sanksi pencabutan status penggunaan barang dapat dikenakan bila SKPD tidak menggunakan barang untuk mendukung tupoksi SKPD.					
	PEMANFAATAN	STS	TS	N	S	SS
1	Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk penyewaan maupun pinjam pakai dilakukan dengan persetujuan dari pengelola barang (Sekda) dan pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah (Bupati).					
2	Pemanfaatan barang milik daerah (Penyewaan maupun pinjam pakai) dituangkan dalam surat perjanjian yang memuat pihak-pihak yang					

	terlibat, jenis dan jumlah barang, jangka waktu, besaran sewa dan lain-lain.					
3	Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dilakukan bila dana dalam APBD tidak cukup tersedia untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan barang milik daerah tersebut.					
	PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Pengamanan barang milik daerah yang ada di SKPD telah dilakukan secara administrasi dan fisik.					
2	Menurut pendapat saya, setiap kepemilikan barang milik daerah harus diamankan secara hukum melalui bukti kepemilikan (sertifikat) yang diatas namakan pemerintah daerah.					
3	Pemeliharaan atas setiap barang milik daerah yang ada di SKPD harus sesuai Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPM).					
	PENILAIAN	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut pendapat saya, penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah telah dilakukan dengan perpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).					
2	Selain itu penilaian barang milik daerah, penilaian dapat dilakukan oleh penilai independen yang ditetapkan oleh Sekda dan atau Bupati.					
	PENGHAPUSAN	STS	TS	N	S	SS
1	SKPD mengajukan penetapan penghapusan barang milik daerah yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang (Sekda) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.					
2	Barang milik daerah yang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipindah tangankan ditindak lanjuti dengan pemusnahan setelah penetapan penghapusannya disetujui					
	PEMINDAHTANGANAN	STS	TS	N	S	SS
1	Pemindah tangan barang milik daerah dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah maupun pernyataan modal pemerintah harus melalui prosedur persetujuan DPRD.					
2	Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan tanpa persetujuan DPRD bila					

	diperuntukkan bagi kepentingan umum atau tidak sesuai dengan tata ruang wilayah.					
--	--	--	--	--	--	--

	PEMUTUSAN	STS	TS	N	S	SS
1	Setiap barang milik daerah yang ada di SKPD harus di daftar dan dicatat ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) menurut penggolongan dan kodefikasinya.					
2	Menurut daya, penyimpanan dokumen kepemilikan barang milik daerah telah dilaksanakan dengan tertib.					
3	SKPD melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah yang ada di SKPD sekurang-kurangnya 5 tahun sekali kecuali untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, SKPD melakukan inventarisasi setiap tahunnya.					
4	SKPD harus menyusun Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan laporan Barang pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang (Sekda) sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.					
5	Mutasi barang bertambah dan atau berkurang di SKPD tiap semester selalu di catat dengan tertib dalam Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang					
	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	STS	TS	N	S	SS
1	Aparat pengawas melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah di SKPD.					
2	Hasil audit aparat pengawas disampaikan kepada pengelola barang (sekda) dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					

Pilihlah jawaban dari pertanyaan di bawah ini :

Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 Ya

Skor 0 Tidak

5. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
RELEVAN			
1	Informasi dalam laporan keuangan SKPD pada tahun sebelumnya dapat digunakan dalam penyusunan anggaran untuk tahun yang akan datang.		
2	Penyampaian laporan keuangan SKPD dilakukan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.		
3	Informasi keuangan segera tersedia setiap pimpinan membutuhkannya.		
4	Laporan keuangan yang di sajikan terdiri dari Neraca, Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.		
5	Laporan realisasi anggaran harus menyajikan secara lengkap informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan secara tersanding antara anggaran dan realisasinya.		
6	Laporan neraca harus menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana secara lengkap dan jelas untuk mengenai posisi pos-pos tersebut pada tangga; tertentu.		
7	Laporan Catatan Atas laporan Keuangan, saya harus memuat secara lengkap dan jelas mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, pencapaian target APBD, pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi lain yang diperlukan.		
ANDAL		YA	TIDAK
1	Setiap transaksi selalu diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri No. 13 Tahun 2006).		
2	Setiap transaksi yang disajikan telah didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meyakinkan para pengguna laporan keuangan.		
3	Menurut pendapat saya, pengujian yang dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang		

	berbeda akan menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.		
4	Laporan keuangan harus disusun dan diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan piha tertentu.		
5	Menurut pendapat saya, laporan keuangan yang netral tidak berarti bahwa informasi yang terkandung di dalamnya tidak mempengaruhi perilaku penggunaannya. Tanpa adanya pengaruh terhadap perilaku penyediaan informasi keuangan menjadi sia-sia.		
	DAPAT DIBANDINGKAN	YA	TIDAK
1	Pengguna laporan keuangan dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk melihat pencapaian target anggaran dalam laporan realisasi anggaran.		
2	Pengguna laporan keuangan dapat melakukan perbandingan laporan realisasi anggaran SKPD untuk tahun 2011 dengan 2012 untuk melihat apakah terjadi peningkatan/penurunan dalam pencapaian target anggaran.		
3	Perkembangan asset dapat diketahui dengan melakukan perbandingan asset SKPD tahun 2011 dengan tahun 2012 dalam neraca.		
4	Kinerja SKPD dapat diketahui dengan membandingkan laporan keuangan SKPD tahun lalu dengan tahun sekarang.		
	DAPAT DIPAHAMI	YA	TIDAK
1	Nama akun, komponen dan struktur laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SAP) akan membantu para pengguna dalam memahami laporan keuangan.		
2	Menurut pendapat saya, laporan keuangan menjadi tidak bermanfaat bila pemakai tidak memahami informasi yang terkandung didalamnya.		
3	Menurut pendapat saya, laporan keuangan sudah jelas diketahui keuangannya, namun dapat menjadi tidak bermanfaat bila pemakai tidak berusaha memahami / belajar memahaminya.		

LAMPIRAN II : TABULASI DATA
SUMBER DAYA MANUSIA

Responden	Item Pertanyaan											Jlh X1	Rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	52	4,7
2	5	5	5	4	4	5	4	3	4	4	5	48	4,4
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	41	3,7
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,9
5	4	3	3	5	5	4	4	5	5	4	4	46	4,2
6	4	5	4	5	5	5	3	5	3	5	5	49	4,5
7	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	52	4,7
8	5	4	4	4	5	3	5	4	4	4	4	46	4,2
9	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	44	4,0
10	2	5	3	5	5	5	4	4	4	4	4	45	4,1
11	5	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	42	3,8
12	5	4	4	5	5	4	4	4	4	2	2	43	3,9
13	4	4	4	5	5	4	4	4	4	2	4	44	4,0
14	4	5	4	5	5	5	3	3	2	4	4	44	4,0
15	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	47	4,3
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5,0
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5,0
18	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	52	4,7
19	5	5	4	5	5	5	3	4	4	4	4	48	4,4
20	4	4	3	5	5	5	4	4	4	2	4	44	4,0
21	3	5	5	4	4	4	2	2	2	5	3	39	3,5
22	2	4	2	4	4	4	2	2	2	2	4	32	2,9
23	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	43	3,9
24	2	2	3	5	5	5	4	4	4	4	4	42	3,8
25	5	5	4	5	5	5	3	3	3	4	4	46	4,2
26	5	5	4	4	4	4	2	2	2	4	4	40	3,6
27	4	4	4	5	5	4	4	4	4	2	4	44	4,0
28	4	4	4	5	5	4	4	4	4	2	4	44	4,0
29	4	4	4	5	5	4	4	5	5	2	5	47	4,3

30	4	4	3	5	5	4	2	3	3	2	4	39	3,5
31	3	4	2	4	5	2	2	5	5	2	2	36	3,3
32	5	5	5	4	5	5	4	4	4	3	4	48	4,4
33	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	38	3,5
34	4	5	3	4	4	3	5	4	4	5	4	45	4,1
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,0
36	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	52	4,7
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,0
38	2	4	3	4	4	4	2	2	2	4	4	35	3,2
39	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	45	4,1
40	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	3	42	3,8
41	4	3	3	4	5	4	4	4	4	3	4	42	3,8
42	5	5	4	1	1	1	5	4	4	2	4	36	3,3
43	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	48	4,4
44	3	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	48	4,4
45	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	47	4,3
46	4	4	3	5	5	5	3	3	3	3	5	43	3,9
47	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	45	4,1
48	2	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	34	3,1
49	2	5	4	5	5	4	5	3	4	4	4	45	4,1
50	4	4	4	5	4	3	3	3	4	4	4	42	3,8
51	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	47	4,3
52	3	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	46	4,2
53	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,0
54	2	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	38	3,5
55	2	5	3	5	5	5	3	4	4	4	4	44	4,0
56	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	39	3,5
57	4	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,9
58	4	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	46	4,2
59	2	2	2	5	5	5	4	4	4	5	5	43	3,9
60	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	49	4,5
61	4	4	5	4	5	4	4	3	4	5	5	47	4,3
62	2	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	47	4,3
63	2	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	45	4,1
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45	4,1

65	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,7
66	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	48	4,4
67	1	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	39	3,5
68	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	46	4,2
69	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	47	4,3
70	2	4	3	5	5	5	4	4	5	4	4	45	4,1
71	3	5	5	4	4	3	4	3	4	4	5	44	4,0
72	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	48	4,4
73	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	49	4,5
74	2	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	42	3,8
75	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	51	4,6
76	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	48	4,4
77	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	47	4,3
78	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	43	3,9
79	2	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	46	4,2
80	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	4	50	4,5
81	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	48	4,4
82	3	5	5	4	4	3	4	3	4	4	5	44	4,0
83	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	48	4,4
84	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	49	4,5
85	2	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	42	3,8
86	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	51	4,6
87	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	48	4,4
88	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	47	4,3
89	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	43	3,9
90	2	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	46	4,2
91	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	4	50	4,5
92	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	41	3,7
93	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	49	4,5
94	3	4	3	5	5	4	4	4	4	3	4	43	3,9
95	3	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	44	4,0
96	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	47	4,3
97	3	4	4	3	5	3	4	5	4	5	5	45	4,1
98	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	50	4,5

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Responden	Item Pertanyaan													Jlh X2	Rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	56	4,3
2	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	61	4,7
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,0
4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	58	4,5
5	5	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	5	5	55	4,2
6	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	60	4,6
7	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	55	4,2
8	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	57	4,4
9	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	54	4,2
10	4	3	5	3	4	5	5	4	3	3	4	4	5	52	4,0
11	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	51	3,9
12	4	2	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	52	4,0
13	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	61	4,7
14	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	2	4	52	4,0
15	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59	4,5
16	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	60	4,6
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5,0
18	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64	4,9
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5,0
20	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	45	3,5
21	5	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	54	4,2
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,0
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	63	4,8
24	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	46	3,5
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,0
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,0
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,0
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,0
29	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	55	4,2
30	5	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	56	4,3

31	5	2	2	2	2	4	4	4	2	2	1	2	2	34	2,6
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	62	4,8
33	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	3,8
34	3	4	5	4	2	5	5	5	4	5	4	2	4	52	4,0
35	4	2	4	5	5	5	4	4	5	4	3	4	4	53	4,1
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5,0
37	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63	4,8
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,0
39	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	54	4,2
40	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	62	4,8
41	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	3,8
42	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	62	4,8
43	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51	3,9
44	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	60	4,6
45	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	58	4,5
46	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57	4,4
47	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	64	4,9
48	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51	3,9
49	5	5	4	5	3	4	5	5	5	4	4	5	4	58	4,5
50	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	4	3	54	4,2
51	4	4	3	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	55	4,2
52	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	57	4,4
53	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	4,6
54	5	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61	4,7
55	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	56	4,3
56	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	48	3,7
57	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	58	4,5
58	5	1	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57	4,4
59	4	1	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	57	4,4
60	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	58	4,5
61	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	54	4,2
62	5	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	55	4,2
63	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	61	4,7
64	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	57	4,4

65	4			5	5		5	5	5	5	4	5	5	61	4,7
66	4	4	4	5	5		4	5	5	5	5	5		59	4,5
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5,0
68	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	62	4,8
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5,0
70	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	51	3,9
71	3	4	3	4	4	4	5	5	3	4	3	4	4	50	3,8
72	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	55	4,2
73	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	59	4,5
74	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	49	3,8
75	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	58	4,5
76	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	57	4,4
77	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	57	4,4
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,0
79	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	56	4,3
80	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	57	4,4
81	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	56	4,3
82	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	58	4,5
83	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	57	4,4
84	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	57	4,4
85	4	2	4	3	5	4	4	4	5	4	3	4	4	50	3,8
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	5,0
87	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	56	4,3
88	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	57	4,4
89	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	48	3,7
90	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	57	4,4
91	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	56	4,3
92	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	62	4,8
93	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51	3,9
94	4	3	4	3	4	4	3	4	4	5	4	5	5	52	4,0
95	3	4	4	3	4	4	3	5	3	3	4	4	4	48	3,7
96	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	54	4,2
97	3	3	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	49	3,8
98	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	58	4,5

Responden	Item Pertanyaan					Jlh X3	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
1	5	5	5	5	5	25	5
2	5	5	4	1	5	20	4
3	4	3	4	4	4	19	3,8
4	4	4	4	4	4	20	4
5	5	5	5	5	5	25	5
6	5	5	5	5	5	25	5
7	4	4	4	4	4	20	4
8	5	5	5	5	5	25	5
9	4	4	4	4	5	21	4,2
10	4	4	4	4	4	20	4
11	4	4	4	4	4	20	4
12	4	4	5	5	5	23	4,6
13	5	4	5	5	5	24	4,8
14	5	5	5	5	5	25	5
15	4	4	4	4	4	20	4
16	5	5	5	5	5	25	5
17	5	5	4	5	4	23	4,6
18	5	5	5	5	5	25	5
19	5	5	5	5	5	25	5
20	5	4	4	4	4	21	4,2
21	3	3	4	4	4	18	3,6
22	4	4	4	4	4	20	4
23	4	4	4	4	4	20	4
24	4	4	4	4	4	20	4
25	4	4	4	4	4	20	4
26	5	4	4	4	5	22	4,4
27	5	5	5	5	5	25	5
28	5	5	5	5	5	25	5
29	5	5	5	5	5	25	5
30	5	5	5	2	4	21	4,2
31	5	4	2	4	2	17	3,4
32	5	5	5	5	5	25	5
33	4	4	4	4	4	20	4
34	4	4	5	2	2	17	3,4
35	5	5	4	4	4	22	4,4
36	5	5	5	5	5	25	5
37	4	4	4	4	4	20	4
38	4	4	4	4	4	20	4
39	5	5	5	3	5	23	4,6
40	4	4	5	5	5	23	4,6
41	4	4	4	3	4	19	3,8
42	5	5	5	5	5	25	5
43	4	4	4	4	4	20	4
44	4	5	5	5	5	24	4,8
45	4	4	5	5	5	23	4,6
46	4	4	4	4	5	21	4,2
47	5	5	5	5	5	25	5
48	5	4	5	5	4	23	4,6

49	5	5	5	5	5	25	5
50	4	4	4	4	4	20	4
51	4	4	4	4	5	21	4,2
52	5	4	4	3	5	21	4,2
53	3	3	3	3	3	15	3
54	4	4	4	4	4	20	4
55	3	3	4	4	4	18	3,6
56	3	4	3	4	4	18	3,6
57	4	4	5	4	4	21	4,2
58	4	4	4	4	4	20	4
59	4	5	4	4	5	22	4,4
60	5	5	5	4	4	23	4,6
61	4	4	4	4	4	20	4
62	4	4	5	5	5	23	4,6
63	4	4	5	5	4	22	4,4
64	5	5	5	5	5	25	5
65	5	5	5	5	5	25	5
66	4	4	4	4	4	20	4
67	4	4	4	5	4	21	4,2
68	5	5	5	5	5	25	5
69	5	4	4	5	5	23	4,6
70	5	4	4	4	4	21	4,2
71	4	4	4	3	3	18	3,6
72	4	4	4	2	2	16	3,2
73	5	4	4	4	5	22	4,4
74	4	5	5	4	4	22	4,4
75	4	5	4	4	5	22	4,4
76	4	4	4	4	4	20	4
77	4	4	4	5	5	22	4,4
78	4	4	4	5	5	22	4,4
79	5	5	4	4	4	22	4,4
80	5	4	5	3	4	21	4,2
81	4	4	3	4	3	18	3,6
82	5	5	5	5	5	25	5
83	4	4	4	4	4	20	4
84	4	4	3	3	3	17	3,4
85	4	4	4	5	5	22	4,4
86	4	5	5	5	4	23	4,6
87	5	5	4	4	4	22	4,4
88	5	4	4	4	4	21	4,2
89	5	5	5	4	5	24	4,8
90	4	4	5	4	4	21	4,2
91	4	4	4	5	4	21	4,2
92	4	5	5	5	5	24	4,8
93	5	4	4	4	4	21	4,2
94	4	4	5	5	5	23	4,6
95	5	4	5	5	5	24	4,8
96	5	4	4	4	5	22	4,4
97	5	5	5	5	5	25	5
98	5	4	4	2	4	19	3,8

PENGELOLAAN ASSET

Responden	Item Pertanyaan																									Jlh X4	Rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	5	5	5	4	5	3	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	111	4,4
2	4	4	4	5	5	4	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	2	5	5	4	4	5	4	5	106	4,2
3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	96	3,8
4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	97	3,9
5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	5	5	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	100	4,0
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	3	5	5	4	4	4	106	4,2
7	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	4	4	4	3	92	3,7
8	4	5	4	4	5	4	4	5	3	2	5	4	4	4	5	5	4	2	5	5	5	5	4	4	4	105	4,2
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	100	4,0
10	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	3	3	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	111	4,4
11	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5	5	5	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	101	4,0
12	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	2	2	4	5	4	4	4	4	4	4	106	4,2
13	4	4	5	3	4	5	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	97	3,9
14	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	87	3,5
15	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	5	3	3	88	3,5
16	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	119	4,8
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125	5,0
18	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	106	4,2
19	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	3	1	5	5	5	5	113	4,5
20	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	91	3,6
21	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	87	3,5
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	4,0
23	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	110	4,4
24	4	4	4	2	2	3	3	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	2	4	2	2	4	4	2	3	81	3,2
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	4,0
26	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96	3,8
27	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	5	5	4	4	4	4	4	4	97	3,9
28	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	97	3,9
29	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	97	3,9
30	4	5	4	3	4	4	3	4	3	5	4	3	4	5	4	5	3	4	4	2	3	4	5	4	4	97	3,9

31	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	4	2	2	2	4	2	2	2	4	4		4	5	4	2	65	2,6
32	5	4	5	3	5	3	5	5	3	4	5	4	4	5	5	5	5	2	5	4	4	4	5	4	4	107	4,3
33	4	4	4	3	3	3	3	4	2	4	4	3	3	3	2	3	4	2	5	4	3	5	4	2	3	84	3,4
34	2	5	4	3	4	5	3	4	3	1	2	4	3	2	2	4	4	1	5	4	3	5	4	2	4	83	3,3
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	100	4,0
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	2	4	5	5	5	5	117	4,7
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	118	4,7
38	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	95	3,8
39	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	98	3,9
40	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	3	4	4	4	4	103	4,1
41	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	95	3,8
42	5	4	5	5	5	4	5	5	4	3	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	2	5	4	4	4	109	4,4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	97	3,9
44	5	4	2	3	4	5	4	5	4	3	5	4	3	4	5	3	5	2	5	1	4	4	4	3	4	95	3,8
45	5	4	2	3	4	5	5	5	4	3	5	4	4	5	5	5	5	2	5	2	4	5	4	4	4	103	4,1
46	4	5	5	5	5	3	3	4	3	5	4	4	3	4	5	5	3	4	5	4	4	3	5	4	4	103	4,1
47	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	118	4,7
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	4,0
49	5	5	4	5	4	4	5	5	4	3	5	5	4	2	4	4	3	4	5	3	4	5	5	4	5	106	4,2
50	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	84	3,4
51	4	4	5	3	5	5	4	4	3	3	4	5	3	4	4	4	3	4	4	3	2	4	4	4	4	96	3,8
52	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	4	2	4	4	4	4	98	3,9
53	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	100	4,0
54	4	4	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	105	4,2
55	3	5	5	5	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	94	3,8
56	4	4	4	4	5	5	3	3	2	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	92	3,7
57	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	104	4,2
58	1	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	3	5	5	3	5	4	4	4	103	4,1
59	3	4	5	5	4	4	3	3	3	5	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	95	3,8
60	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	3	3	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	103	4,1
61	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	107	4,3
62	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	108	4,3
63	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	102	4,1
64	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	101	4,0

65	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4	108	4,3
66	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	103	4,1
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125	5,0
68	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	108	4,3
69	4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	4	2	5	4	4	4	108	4,3
70	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	1	4	4	4	4	92	3,7
71	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	113	4,5
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	4,0
73	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	107	4,3
74	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	90	3,6
75	5	5	5	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	101	4,0
76	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	106	4,2
77	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5	99	4,0
78	5	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	95	3,8
79	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	104	4,2
80	4	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	3	4	5	4	5	3	4	4	3	3	3	5	4	4	99	4,0
81	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	106	4,2
82	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	110	4,4
83	4	4	4	3	3	3	3	4	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	5	4	3	5	4	4	3	93	3,7
84	4	5	4	4	4	5	3	4	3	4	2	4	3	4	4	4	4	2	5	4	4	5	4	2	4	95	3,8
85	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	93	3,7
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	122	4,9
87	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	105	4,2
88	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	105	4,2
89	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	91	3,6
90	4	4	3	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	102	4,1
91	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	105	4,2
92	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	112	4,5
93	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	93	3,7
94	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	3	5	3	5	3	4	4	4	3	4	101	4,0
95	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	108	4,3
96	4	5	5	5	5	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	102	4,1
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	92	3,7
98	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	112	4,5

LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Responden	item Pertanyaan																			Jlh Y	Rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	15	0,8
5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
7	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
8	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	0,8
9	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
10	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	17	0,9
11	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	16	0,8
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
14	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	0,9
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
24	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	17	0,9
25	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15	0,8
26	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	13	0,7
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
30	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	13	0,7

	0	0	0							0	0	0	1	1	1	1		1	1	1	0,6
32	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1		1	1	19	1,0
33	1	0	1	1	1	0				0	0	0	1	0	0	1		0	0	9	0,5
34	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	9	0,5
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
38	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
40	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	0,8
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
42	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	17	0,9
43	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
44	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	0,9
45	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	0,9
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
47	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	17	0,9
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	16	0,8
49	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	16	0,8
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	16	0,8
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17	0,9
53	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	0,9
54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
56	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
57	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
59	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	17	0,9
61	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	17	0,9
62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
64	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	0,9

65	1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0	
66	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	16	0,8
67	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	17	0,9
68	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	17	0,9
69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
71	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
72	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	15	0,8
73	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	15	0,8
74	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	15	0,8
75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	18	0,9
76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
77	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	16	0,8
78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
80	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	15	0,8
81	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	14	0,7
82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
83	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	17	0,9
84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
85	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	14	0,7
86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
89	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	16	0,8
90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15	0,8
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
93	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	17	0,9
94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
95	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0,9
96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,0
97	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	17	0,9
98	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	15	0,8

LAMPIRAN III : ANALISIS DESKRIFTIF**item1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.0	1.0	1.0
2	20	20.4	20.4	21.4
Valid 3	15	15.3	15.3	36.7
4	40	40.8	40.8	77.6
5	22	22.4	22.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	6	6.1	6.1	8.2
Valid 4	55	56.1	56.1	64.3
5	35	35.7	35.7	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	6	6.1	6.1	6.1
3	20	20.4	20.4	26.5
Valid 4	51	52.0	52.0	78.6
5	21	21.4	21.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.0	1.0	1.0
3	2	2.0	2.0	3.1
Valid 4	48	49.0	49.0	52.0
5	47	48.0	48.0	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.0	1.0	1.0
3	1	1.0	1.0	2.0
Valid 4	42	42.9	42.9	44.9
5	54	55.1	55.1	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.0	1.0	1.0
2	1	1.0	1.0	2.0
Valid 3	8	8.2	8.2	10.2
4	59	60.2	60.2	70.4
5	29	29.6	29.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	6	6.1	6.1	6.1
3	13	13.3	13.3	19.4
Valid 4	60	61.2	61.2	80.6
5	19	19.4	19.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	4	4.1	4.1	4.1
3	20	20.4	20.4	24.5
Valid 4	54	55.1	55.1	79.6
5	20	20.4	20.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	5	5.1	5.1	5.1
3	9	9.2	9.2	14.3
Valid 4	62	63.3	63.3	77.6
5	22	22.4	22.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	11	11.2	11.2	11.2
3	7	7.1	7.1	18.4
Valid 4	53	54.1	54.1	72.4
5	27	27.6	27.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	5	5.1	5.1	7.1
Valid 4	60	61.2	61.2	68.4
5	31	31.6	31.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	7	7.1	7.1	9.2
Valid 4	62	63.3	63.3	72.4
5	27	27.6	27.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	2	2.0	2.0	2.0
2	8	8.2	8.2	10.2
Valid 3	14	14.3	14.3	24.5
4	53	54.1	54.1	78.6
5	21	21.4	21.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.0	1.0	1.0
3	10	10.2	10.2	11.2
Valid 4	66	67.3	67.3	78.6
5	21	21.4	21.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	5	5.1	5.1	7.1
Valid 4	48	49.0	49.0	56.1
5	43	43.9	43.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	3	3.1	3.1	5.1
Valid 4	54	55.1	55.1	60.2
5	39	39.8	39.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
4	61	62.2	62.2	62.2
Valid 5	37	37.8	37.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	2	2.0	2.0	2.0
Valid 4	33	33.7	33.7	35.7
5	63	64.3	64.3	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item19

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
4	38	38.8	38.8	38.8
Valid 5	60	61.2	61.2	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item20

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.0	1.0	1.0
3	5	5.1	5.1	6.1
Valid 4	48	49.0	49.0	55.1
5	44	44.9	44.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.0	1.0	1.0
3	4	4.1	4.1	5.1
Valid 4	51	52.0	52.0	57.1
5	42	42.9	42.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.0	1.0	1.0
3	7	7.1	7.1	8.2
Valid 4	64	65.3	65.3	73.5
5	26	26.5	26.5	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	4	4.1	4.1	4.1
3	4	4.1	4.1	8.2
Valid 4	49	50.0	50.0	58.2
5	41	41.8	41.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	6	6.1	6.1	8.2
Valid 4	51	52.0	52.0	60.2
5	39	39.8	39.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	4	4.1	4.1	4.1
Valid 4	49	50.0	50.0	54.1
5	45	45.9	45.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	4	4.1	4.1	4.1
Valid 4	58	59.2	59.2	63.3
5	36	36.7	36.7	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.0	1.0	1.0
3	4	4.1	4.1	5.1
Valid 4	51	52.0	52.0	57.1
5	42	42.9	42.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item28

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.0	1.0	1.0
2	4	4.1	4.1	5.1
Valid 3	7	7.1	7.1	12.2
4	46	46.9	46.9	59.2
5	40	40.8	40.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Item29

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	3	3.1	3.1	3.1
3	4	4.1	4.1	7.1
Valid 4	45	45.9	45.9	53.1
5	46	46.9	46.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item30

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.0	1.0	1.0
2	2	2.0	2.0	3.1
Valid 3	3	3.1	3.1	6.1
4	67	68.4	68.4	74.5
5	25	25.5	25.5	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item31

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.0	1.0	1.0
3	1	1.0	1.0	2.0
Valid 4	66	67.3	67.3	69.4
5	30	30.6	30.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item32

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	3	3.1	3.1	3.1
3	5	5.1	5.1	8.2
Valid 4	61	62.2	62.2	70.4
5	29	29.6	29.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item33

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	18	18.4	18.4	20.4
Valid 4	53	54.1	54.1	74.5
5	25	25.5	25.5	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item34

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	11	11.2	11.2	13.3
Valid 4	60	61.2	61.2	74.5
5	25	25.5	25.5	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item35

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.0	1.0	1.0
3	19	19.4	19.4	20.4
Valid 4	52	53.1	53.1	73.5
5	26	26.5	26.5	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item36

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.0	1.0	1.0
3	29	29.6	29.9	30.9
Valid 4	41	41.8	42.3	73.2
5	26	26.5	26.8	100.0
Total	97	99.0	100.0	
Missing System	1	1.0		
Total	98	100.0		

item37

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.0	1.0	1.0
3	18	18.4	18.4	19.4
Valid 4	48	49.0	49.0	68.4
5	31	31.6	31.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item38

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	3	3.1	3.1	3.1
3	27	27.6	27.6	30.6
Valid 4	50	51.0	51.0	81.6
5	18	18.4	18.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item39

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	2	2.0	2.0	2.0
2	2	2.0	2.0	4.1
Valid 3	18	18.4	18.4	22.4
4	49	50.0	50.0	72.4
5	27	27.6	27.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item40

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	4	4.1	4.1	6.1
Valid 4	61	62.2	62.2	68.4
5	31	31.6	31.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item41

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	10	10.2	10.2	12.2
Valid 4	64	65.3	65.3	77.6
5	22	22.4	22.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item42

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.0	1.0	1.0
3	23	23.5	23.5	24.5
Valid 4	56	57.1	57.1	81.6
5	18	18.4	18.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item43

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	3	3.1	3.1	3.1
3	16	16.3	16.3	19.4
Valid 4	50	51.0	51.0	70.4
5	29	29.6	29.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item44

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.0	2.0	2.0
3	2	2.0	2.0	4.1
Valid 4	65	66.3	66.3	70.4
5	29	29.6	29.6	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item45

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	3	3.1	3.1	3.1
3	10	10.2	10.2	13.3
Valid 4	59	60.2	60.2	73.5
5	26	26.5	26.5	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item46

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.0	1.0	1.0
2	3	3.1	3.1	4.1
Valid 3	17	17.3	17.3	21.4
4	52	53.1	53.1	74.5
5	25	25.5	25.5	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item47

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.0	1.0	1.0
2	14	14.3	14.3	15.3
3	16	16.3	16.3	31.6
4	50	51.0	51.0	82.7
5	17	17.3	17.3	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item48

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.0	2.0	2.0
3	3	3.1	3.1	5.1
4	56	57.1	57.1	62.2
5	37	37.8	37.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item49

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.0	1.0	1.0
2	5	5.1	5.1	6.1
3	21	21.4	21.4	27.6
4	56	57.1	57.1	84.7
5	15	15.3	15.3	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item50

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2.0	2.0	2.0
2	7	7.1	7.1	9.2
3	16	16.3	16.3	25.5
4	61	62.2	62.2	87.8
5	12	12.2	12.2	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item51

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	11	11.2	11.2	11.2
4	62	63.3	63.3	74.5
5	25	25.5	25.5	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item52

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	3	3.1	3.1	3.1
4	71	72.4	72.4	75.5
5	24	24.5	24.5	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item53

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	4	4.1	4.1	4.1
3	7	7.1	7.1	11.2
4	77	78.6	78.6	89.8
5	10	10.2	10.2	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item54

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	1.0	1.0	1.0
3	9	9.2	9.2	10.2
4	78	79.6	79.6	89.8
5	10	10.2	10.2	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Deskripsi variabel dependen (Y)**Frequency Table****item1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	3	3.1	3.1	3.1
1	95	96.9	96.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	39	39.8	39.8	39.8
1	59	60.2	60.2	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	4	4.1	4.1	4.1
1	94	95.9	95.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	3	3.1	3.1	3.1
Valid 1	95	96.9	96.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	5	5.1	5.1	5.1
Valid 1	93	94.9	94.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	6	6.1	6.1	6.1
Valid 1	92	93.9	93.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	10	10.2	10.2	10.2
Valid 1	88	89.8	89.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	5	5.1	5.1	5.1
Valid 1	93	94.9	94.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	1	1.0	1.0	1.0
Valid 1	97	99.0	99.0	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	12	12.2	12.2	12.2
Valid 1	86	87.8	87.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	8	8.2	8.2	8.2
Valid 1	90	91.8	91.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	8	8.2	8.2	8.2
Valid 1	90	91.8	91.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	4	4.1	4.1	4.1
Valid 1	94	95.9	95.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	2	2.0	2.0	2.0
Valid 1	96	98.0	98.0	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	7	7.1	7.1	7.1
Valid 1	91	92.9	92.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	8	8.2	8.2	8.2
Valid 1	90	91.8	91.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	16	16.3	16.3	16.3
Valid 1	82	83.7	83.7	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	10	10.2	10.2	10.2
Valid 1	88	89.8	89.8	100.0
Total	98	100.0	100.0	

item19

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	4	4.1	4.1	4.1
Valid 1	94	95.9	95.9	100.0
Total	98	100.0	100.0	

LAMPIRAN IV : UJI ASUMSI KLASIK

1. HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.09946892
	Absolute	.081
Most Extreme Differences	Positive	.054
	Negative	-.081
Kolmogorov-Smirnov Z		.806
Asymp. Sig. (2-tailed)		.534

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.083	.119		.695	.489		
SDM	.068	.022	.301	3.089	.003	.710	1.408
1 komitmen	.004	.021	.020	.179	.859	.522	1.917
SPI	.061	.021	.287	2.946	.004	.709	1.410
Asset	.063	.027	.222	2.324	.022	.740	1.352

a. Dependent Variable: Lap. Keuangan

3. HASIL UJI HETROEKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.078	.120		-.650	.517
SDM	.011	.022	.062	.505	.615
SPI	.003	.021	.017	.121	.904
Komitmen	.006	.021	.035	.288	.774
Asset	.004	.027	.017	.139	.890

a. Dependent Variable: absut

LAMPIRAN V : HASIL ANALISIS REGRESI

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.612 ^a	.374	.347	.08785	.374	13.904	4	93	.000	1.986

a. Predictors: (Constant), Asset, SDM, Komitmen, SPI

b. Dependent Variable: Lap. Keuangan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.429	4	.107	13.904	.000 ^b
	Residual	.718	93	.008		
	Total	1.147	97			

a. Dependent Variable: Lap. Keuangan

b. Predictors: (Constant), Asset, SDM, Komitmen, SPI

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.083	.119		.695	.489		
	SDM	.068	.022	.301	3.089	.003	.710	1.408
	komitmen	.004	.021	.020	.179	.859	.522	1.917
	SPI	.061	.021	.287	2.946	.004	.709	1.410
	Asset	.063	.027	.222	2.324	.022	.740	1.352

a. Dependent Variable: Lap. Keuangan